



Laporan Kinerja Triwulan 2 TA 2023



Direktorat Logistik

Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Direktorat Logistik Tahun 2022 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Logistik.

Jakarta, 18 Juli 2023

Direktur Logistik



Berny A. Subki

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Logistik selama Triwulan II Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

- (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan;
- (2) Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;
- (3) Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP;
- (4) Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik;
- (5) Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi;
- (6) Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan;
- (7) Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
- (8) Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan;
- (9) Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang;
- (10) Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan;
- (11) Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen;
- (12) Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton;
- (13) Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku;
- (14) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku;
- (15) Tercapainya Nilai PNBPDitjen PDSPKP;
- (16) Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP dan
- (17) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik

Sasaran strategis di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seluruh Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Logistik mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang logistik yang telah dicapai selama Triwulan II Tahun 2023 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2023 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan II Tahun 2023, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia	4
1.5 Permasalahan Utama	5
1.6 Sistematika Penyajian	6
II. Perencanaan Kinerja	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.1.1 Sasaran Kegiatan	8
2.1.2 Kebijakan	8
2.2 Perjanjian Kinerja	9
III. Akuntabilitas Kinerja	11
3.1 Capaian Kinerja	11
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
3.3 Realisasi Anggaran Direktorat Logistik.....	93
IV. Penutup	97
4.1. Kesimpulan	97
V. Lampiran	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sistem logistik meliputi pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan. Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Logistik termaktub dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Logistik mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2020-2024. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Logistik telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Logistik telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Triwulan II Tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan II Tahun 2023 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi

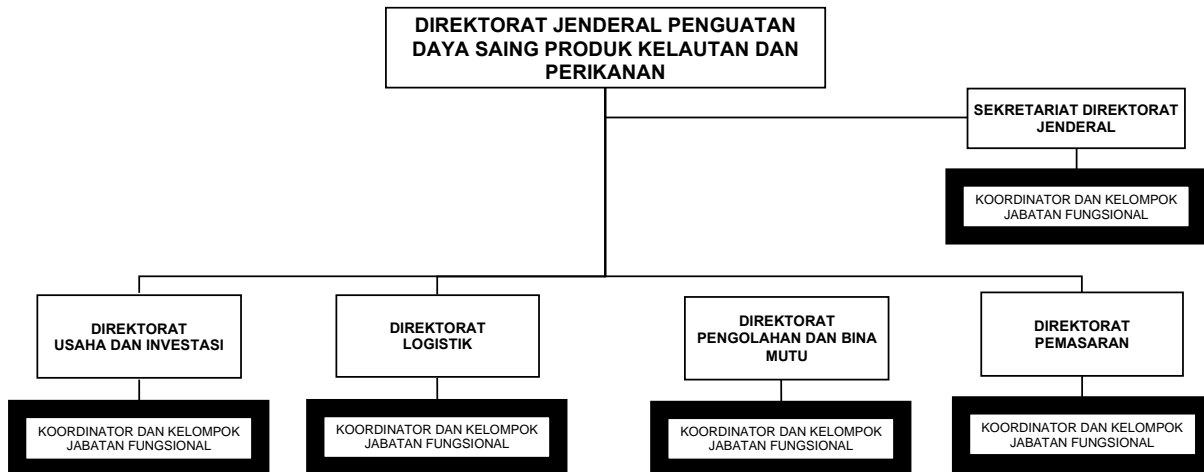
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Direktorat Logistik langsung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sistem logistik meliputi pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Logistik dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

1. Kelompok Pemetaan dan Pemantauan;
2. Kelompok Tata Niaga;
3. Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan;
4. Kelompok Distribusi;
5. Kelompok Tata Usaha.



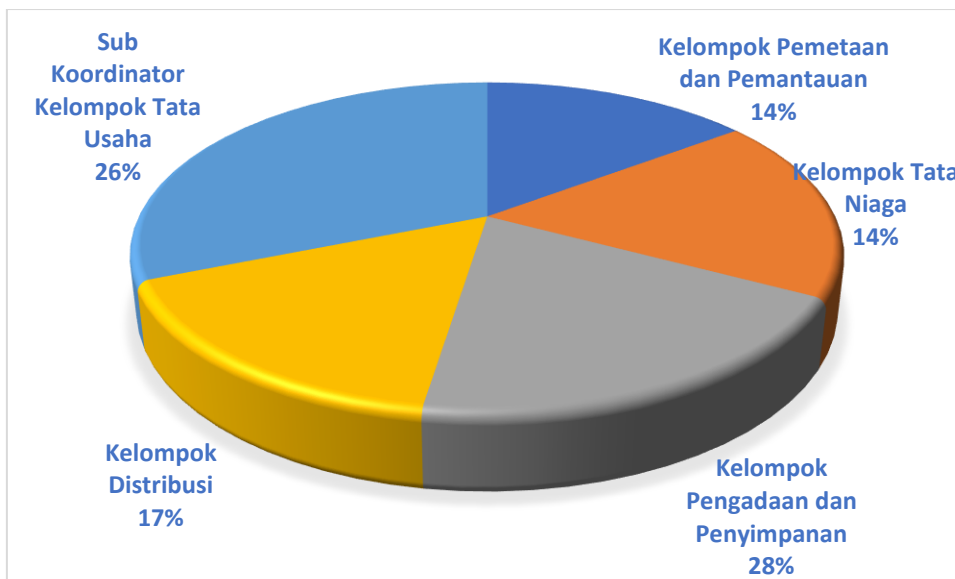
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Logistik sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 70 orang, dengan rincian sebagai berikut:

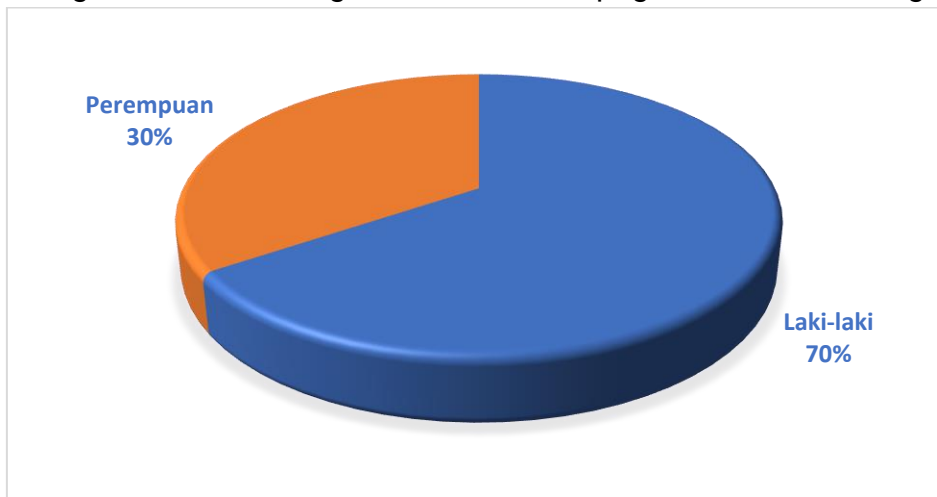
1. Jumlah pegawai menurut unit kerja

Apabila dilihat dari gambar di bawah, jumlah pegawai menurut unit kerja terbanyak terdapat di Kelompok Tata Usaha, yakni 18 orang, atau sekitar 26% dari total pegawai Direktorat Logistik. Sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit terdapat di Kelompok Tata Niaga dan Kelompok Pemetaan dan Pemantauan, yakni 9 orang atau setara dengan 14% dari total jumlah pegawai Direktorat Logistik.



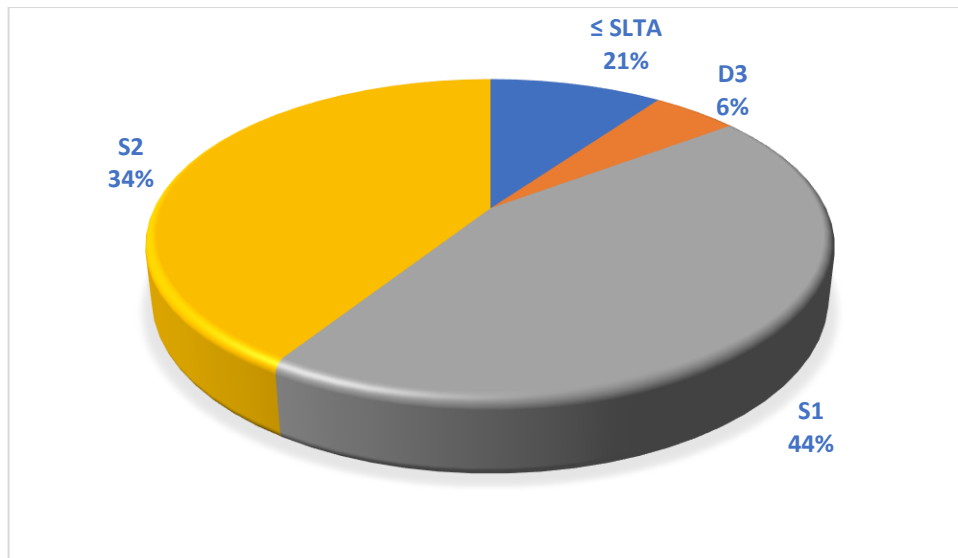
Gambar 2. Jumlah Pegawai menurut Unit Kerja

- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 49 orang, atau setara dengan 70% dari total pegawai Direktorat Logistik, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau setara dengan 30% dari total pegawai Direktorat Logistik.



Gambar 3. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S2 sebanyak 34 orang, S1 sebanyak 44 orang, D3 sebanyak 6 orang, ≤ SLTA sebanyak 15 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Logistik terbanyak dengan tingkat pendidikan S2 dan S1, yakni mencapai 44%, sedangkan yang paling sedikit adalah dengan tingkat pendidikan D3, yakni sebanyak 6%.



Gambar 4. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual logistik hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
2. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia;
3. Tidak meratanya potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah timur dan wilayah barat;
4. Lebih majunya perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas di wilayah barat dibandingkan wilayah timur, sehingga sebagian besar investasi perikanan banyak terdapat di wilayah barat;
5. Lebih berkembangnya potensi perikanan budidaya di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur, karena didukung faktor tarikan pasar atau permintaan yang tinggi, infrastruktur dasar yang memadai, baik ketersediaan input produksi seperti benih, pakan dan obat-obatan maupun dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain;
6. Adanya disparitas harga ikan di wilayah barat dan wilayah timur yang menjadi kendala jika ada rencana untuk memasarkan ikan dari wilayah Timur, yang produksinya cukup tinggi namun permintaannya rendah, ke wilayah Barat yang permintaannya tinggi, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih banyak;
7. Tidak tersedianya informasi mengenai pasokan dan permintaan yang memadai, sehingga sering terjadi pasokan di suatu daerah menjadi berlimpah pada suatu waktu, namun pada waktu yang lain pasokan sangat minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem informasi yang terkoneksi antara daerah produksi yang tersebar dengan daerah konsumsi yang umumnya berada di kota-kota besar.

8. Belum optimalnya Pengelolaan gudang beku (BMN) yang dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Logistik selama Triwulan II Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan II Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama TW II tahun 2023;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Logistik, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Logistik serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Logistik;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Logistik Tahun 2023;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Logistik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Logistik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Logistik. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Logistik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Logistik serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Logistik untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2020-2024 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Renstra tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/KEP-DJPDSPKP/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

VISI

“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

MISI

Kedaulatan (Sovereignty):

mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan SDKP, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Keberlanjutan (Sustainability):

mewujudkan pengelolaan SDKP yang berkelanjutan.

Kesejahteraan (Prosperity):

mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Direktorat Logistik langsung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sistem logistik meliputi pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Logistik adalah mengembangkan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Direktorat Logistik pada tahun 2023 mempunyai 17 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan; (3) Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP; (4) Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik; (5) Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi; (6) Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan; (7) Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan; (8) Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan; (9) Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (10) Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan; (11) Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen; (12) Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku; (14) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (15) Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP; (16) Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP dan (17) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik.

2.1.2 Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Logistik adalah Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yakni sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2023. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Logistik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5
2.	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP	2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1
3.	Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	3.	Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	2
4.	Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	1
		5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	1
5.	Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	6.	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	18
6.	Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan	7.	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	18
7.	Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	8.	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	19
8.	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	9.	Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	26
9.	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	10.	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	8
10.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan	11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	3
11.	Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	12.	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
12.	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	13.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	1
13.	Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	14.	Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	1
14.	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	15.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	242
15.	Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	16.	Nilai PNBP Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)	6,66
16.	Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	17.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik (Orang)	1.215
17.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkungan Direktorat Logistik	18.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	83,2
		19.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	80,5
		20.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik (%)	≤0,5
		21.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	75
		22.	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92
		23.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95
		24.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5
		25.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5
		26.	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5

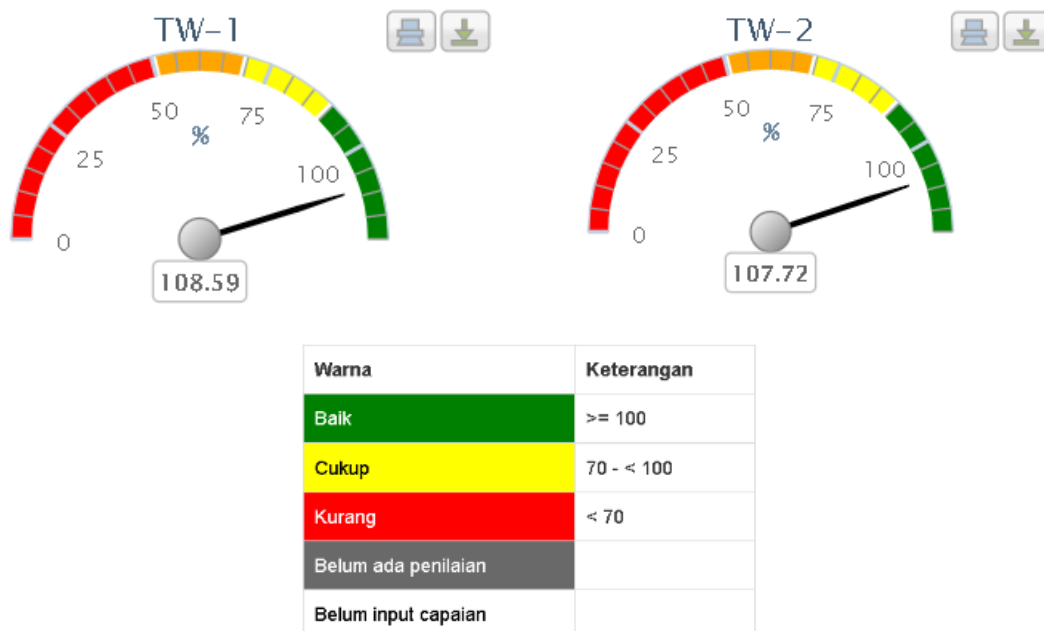
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Logistik tahun 2023 memiliki 26 indikator kinerja yang terdiri dari 4 indikator kinerja yang bersifat triwulanan, 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran dan 21 indikator kinerja yang bersifat tahunan.

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari April sampai dengan Juni 2023. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan TW II sebesar 107,72. Nilai capaian TW II turun 5,88 poin atau sebesar 5,1% dari capaian tahun 2022 periode yang sama yaitu sebesar 113,6. Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan TW I, maka terjadi penurunan sebesar 0,87 poin. Hal ini disebabkan adanya capaian pada TW II yang tidak bisa dilaporkan dalam sistem aplikasi Kinerja karena sistem tidak bisa membaca capaian yang tidak ada targetnya pada TW II. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan selama TW II Tahun 2023, sehingga tidak ada rekomendasi untuk perbaikan pada Triwulan III.



Gambar 5. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW II Direktorat Logistik pada aplikasi kinerja

Target Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja (IK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan II Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW II	sd TW II		
1	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	Koridor	5	-	-	-	PA
2	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	Unit	1	-	-	-	PA
3	Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	Data	2	-	-	-	PA
4	Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	Lembaga	1	-	-	-	PA
		Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	Rekomendasi kebijakan	1	-	-	-	PA
5	Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	9	11	122	PA
6	Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan	Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	8	8	100	PA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW II	sd TW II		
7	Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	Unit	19	-	-	-	PA
8	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	Unit	26	-	-	-	PA
9	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	Lembaga	8	4	4	100	PA
10	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	Lembaga	3	-	1	-	PA
11	Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	Layanan	1	-	-	-	PA
12	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	Unit	1	-	-	-	PA
13	Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Unit	1	-	-	-	PA
14	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Unit	242	-	193	-	PA
15	Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	Nilai PNBP Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)	Miliar	6,66	-	4,3	-	PA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW II	sd TW II		
16	Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik (Orang)	Orang	1.215	-	-	-	PA
17	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkungan Direktorat Logistik	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik	Indeks	83,2	76	79	103	PA
		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	Nilai	80,5	-	-	-	PA
		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	≤0,5	-	-	-	PA
		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	75	75	97	129	RR
		Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar	Persentase	92	92	100	108,69	PA
		Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	95	-	-	-	PA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	TARGET	CAPAIAN	%	POLA HITUNG
					TW II	sd TW II		
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	77,5	-	-	-	PA
		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	77,5	-	-	-	PA
		Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	77,5	-	-	-	PA

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan

1. Indikator Kinerja Kegiatan Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)

Definisi indikator ini adalah Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (storage), transportasi (transportation), dan pelayanan (delivery services) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari titik asal (point of origin) sampai dengan titik tujuan (point of destination) secara efektif dan efisien. Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (material management) dan (b) distribusi. Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (point of origin) ke titik tujuan (point of destination) yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan. Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor. Target indikator tahun 2023 adalah 5 (lima) koridor logistik yang terkelola dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$x = \sum a$$

x :

Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola

a :

Jumlah koridor logistik hasil perikanan yang terkelola

Data dukung berupa dokumen laporan kegiatan pada lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja

ini sudah tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dimana target tahun 2020 sd 2024 adalah 5 koridor logistik yang terkelola.

Tabel 3. Target dan capaian IK 1

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWII	% thd target 2023
1	SK1. Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan						
	IK1. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	Koridor	PA	-	5	-	-

3.2.2. Sasaran Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

2. Indikator Kinerja Kegiatan Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)

Definisi indikator ini adalah Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) unit Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$x = \Sigma a$$

x : Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan

a : Jumlah Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan

Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWII	% thd target 2023
2	SK2. Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan						
	IK2. Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Kegiatan ini dilakukan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAN Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan dengan pagu awal sebesar Rp2.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp353.667.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Realisasi keuangan sampai dengan TW II sebesar Rp843.481.056,- atau sebesar 42,17% dari pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

2.1. Rapat Sosialisasi Petunjuk Teknis PPL STELINA

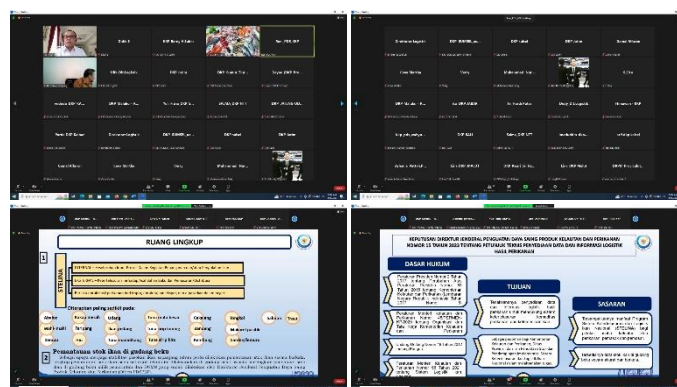
Rapat sosialisasi petunjuk teknis PPL STELINA dilaksanakan pada hari senin, 15 Mei 2023 melalui aplikasi zoom meeting Rapat dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan dan dihadiri oleh tim pendataan stok dan pendampingan implementasi STELINA tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 77 Tahun 2023. Tujuan rapat adalah melakukan sosialisasi tentang petunjuk teknis PPL STELINA.

Berikut beberapa hal yang dibahas dalam rapat.

1. Bagaimana hal yang terkait yang menjadi indikasi regulasi yang kita miliki , semestinya bisa dilaksanakan ataupun eksternal, yang perlu dilaksanakan bagaimana memanfaatkan aplikasinya,
2. Sudah terbit kepdirjen no 15 tahun 2023 tentang juknis penyediaan data dan informasi logistik hasil perikanan, dan input menjadi salah satu hal utama yang di perhatikan, karena penjelasan mekanisme pendataan berpengaruh kepada input yang diberikan
3. Dengan terbitnya KepMen nomor 77 tahun 2023, diharapkan dari provinsi bisa menindaklanjuti SK, dalam hal pendataan, penyediaan dan informasi perikanan
4. Hal-hal yang dilakukan oleh tim sebagai berikut :
 - a. perlu menyiapkan input sebaik-baiknya, merupakan instrument yang penting dalam langkah perencanaan dan evaluasi
 - b. tidak hanya menginput data di aplikasi Stelina untuk pusat tapi juga untuk daerah agar menjadi bahan kebijakan

- c. kewajiban tim pendataan logistik dan implementasi stelina, mengidentifikasi pelaku usaha, melakukan sosialisasi, melakukan update profil, meklakukan pendataan stok ikan di cs, melaporkan perkembangan pelaksanaan pendataan logistic, menyampaikan data , menjaga nama instansi uinit kerja , dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab
- d. hak tim pendataan logistik an implemetasi stelina : menerima honor, menerima bantuan operasional, mendapatkan apresiasi , mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas PPL
- e. tahapan kegiatan : identifikasi pelaku pengolah dan pemasar, sosialisasi manfaat aplikasi stelina, pendampingan pelaku usaha , monitoring dan valuasi, pelaporan.
- f. Implementasi stelina
 - Pelaksanaan adan usaha perikanan
 - Pelaporan, mekanisme pelaporan ada 3 hal penting : laporan pendampingan STELINA dan pemantauan stok CS, sekali dalam sebulan dan disampaikan paling telat tanggal 10 setiap bulan, di tandatangani oelh PPL dala bentuk softcopy dan dikirim ke email
 - Formulir identifikasi pelaku usaha implementasi stelina ada yang diinisiasi, Sosialisasi dan impelementasi stelina : alamat di google drive <https://bit.ly/PANDUANSTELINA>
 - target untuk pengolah dan pemasar pada stelina setiap dinas provinsi sebanyak 5 lokasi (total 100 lokasi), namun lebih bagus apabila lebih dari 5 lokasi, sedangkan untuk target pendataan stok ikan di CS antara 3-10 lokasi CS (total 160 cs). Namun itu semua tidak menjadi angka mutlak bisa saja bertambah apabila di kondisi dilapangan setiap daerah berbeda.

Dokumentasi Rapat Sosialisasi Petunjuk Teknis PPL STELINA



2.2.Rapat Optimalisasi Aplikasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

Rapat optimalisasi aplikasi STELINA dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Juni 2023 di RR. Akses Pasar GMB 3 Lt. 14. Rapat dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan dan dihadiri oleh anggota Perwakilan SBU Perdagangan, Industri, dan Kelautan PT Sucofindo, Internal Kelompok Pemetaan dan Pemantauan. Tujuan rapat adalah membahas tentang optimasi aplikasi STELINA.

Berikut beberapa hal yang dibahas dalam rapat.

1. Dalam rangka interkoneksi aplikasi STELINA dengan Tracetales Masih terdapat pengembangan yang masih harus disempurnakan antara lain :
 - Pengembangan dan integrasi Application Programming Interface (API) STELINA terhadap Tracetales sesuai dengan tahapan-tahapan di timeline serta Penyusunan pedoman API integrasi stelina dengan Tracetales
 - Pemberian pilihan bagi Pengolah/Pemasar untuk dapat melakukan pengisian data mitra pembelian, mitra penjualan dan receiving dari satu level di atasnya dan satu level di bawahnya secara manual menggunakan metode valid dan invalid
 - Kendala data registrasi dan transaksi yang telah di-input namun belum muncul pada akun eksekutif
 - Penambahan kolom nama perusahaan (alamat, kabupaten/kota, provinsi), asal pembelian (nama, alamat, kabupaten/kota, provinsi), dan tujuan penjualan (nama, alamat, kabupaten/kota, provinsi) pada menu transaksi pembelian
 - Penambahan profil ketertelusuran mitra pembelian dan mitra penjualan
 - Menyediakan laporan dokumentasi informasi yang telah dikembangkan berdasarkan ketentuan pada Keputusan Chief Information Officer Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 4693/CIO-KKP/XII/2020
2. Kepala SBU Perdagangan, Industri, dan Kelautan PT Sucofindo menyampaikan :
 - Batasan ruang lingkup yang akan diselesaikan terkait pengembangan aplikasi STELINA
 - Diharapkan STELINA dapat dijadikan menjadi aplikasi yang merasa dibutuhkan oleh pelaku usaha
 - Tim pengembangan aplikasi STELINA Sucofindo berkomitmen menyelesaikan dan integrasi Application Programming Interface (API) STELINA terhadap Tracetales yang belum selesai.
3. MDPI menyampaikan :
 - Mitra pemasar yang belum memiliki ID STELINA (pemasar di pengolah yang menggunakan TraceTales belum memiliki ID STELINA) masih dinyatakan invalid. Pada pertemuan di Bali disepakati akan diperbaharui.
4. Kesepakatan Rapat

- Inventarisir integrasi Application Programming Interface (API) STELINA terhadap Tracetales yang belum selesai
- Tim pengembangan Aplikasi Sucofindo dan Tracetales akan memperbaiki integrasi data yang belum selesai mulai malam ini.
- Tim dari Direktorat Logistik akan mendampingi dalam pelaksanaan integrasi Application Programming Interface (API) STELINA terhadap Tracetales

Dokumentasi Rapat Optimalisasi Aplikasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)



2.3. Rapat Sosialisasi STELINA Kepada Penerima Bantuan Pemerintah

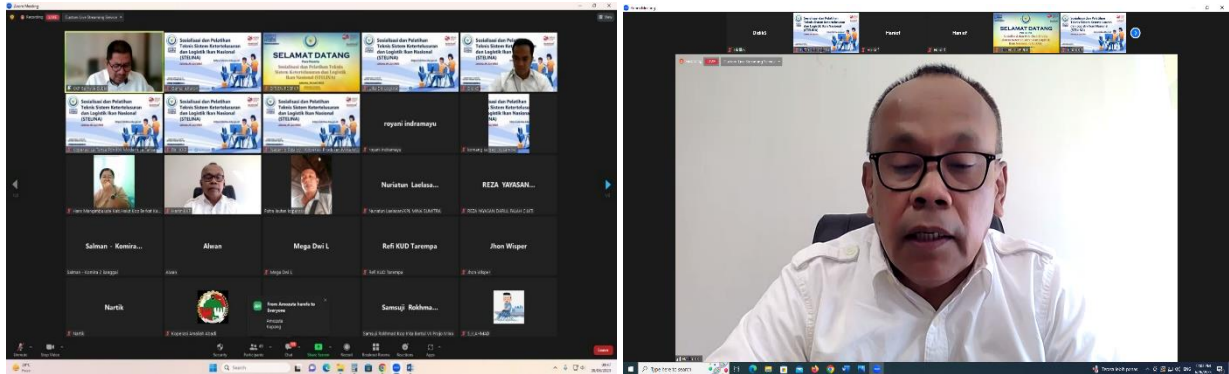
Rapat sosialisasi aplikasi STELINA kepada penerima bantuan pemerintah dilaksanakan pada hari senin, 26 Juni 2023 melalui aplikasi *zoom meeting*. Rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dan dimoderatori oleh Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan. Rapat dihadiri oleh 65 orang para pelaku usaha pengolah dan pemasar penerima bantuan pemerintah mobil thermoking dan cold storage. Tujuan rapat adalah melakukan sosialisasi STELINA kepada penerima bantuan pemerintah.

Berikut beberapa hal yang dibahas dalam rapat.

1. Stelina telah dikembangkan dan akan terus dikembangkan untuk ketertelusuran dengan cara mengintegrasikan dari tangkap, budidaya, hingga pemasaran
2. Orang-orang kota mempunyai tingkat pendidikan lebih baik, tingkat ekonomi biasanya terjadi perubahan konsumsi, imbasnya kebutuhan protein dunia akan meningkat 70%
3. Tujuan Permen KP No 29 tahun 2021 STELINA adalah sistem untuk memastikan ketertelusuran ikan, rantai pasok, dan produk perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan, pembudidaya, distribusi, pengolahan dan pemasaran
4. Permen KP No 06 tahun 2023 tentang penyusunan neraca komoditas perikanan dimana pelaku usaha yang telah memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor sebagai bahan baku dan bahan penolong industry wajib menyampaikan laporan setiap bulan yang isinya data pembeian, penjualan dan distribusi

5. Ada beberapa hal saat ini implementasi STELINA belum bersifat mandatory (wajib):
 - a. kesadaran pelaku usaha dalam penerapan sistem ketertelusuran secara digital masih perlu ditingkatkan,
 - b. kesiapan sistem aplikasi perlu ditingkatkan

Dokumentasi Rapat Sosialisasi STELINA Kepada Penerima Bantuan Pemerintah



3.2.3. Sasaran Kegiatan Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP

3. Indikator Kinerja Kegiatan Data dan informasi logistik hasil KP (Data)

Definisi indikator ini adalah Jumlah data dan Informasi logistik hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi data pengukuran kinerja logistik, dan data pemantauan ketersediaan dan kebutuhan ikan. Target indikator tahun 2023 adalah 2 (dua) Data dan Informasi Logistik Hasil KP dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = a + b$$

X : Data dan Informasi Logistik Hasil KP

a : Data Pengukuran Kinerja Logistik

b : Data Pemantauan ketersediaan dan kebutuhan ikan

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan

perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW2	TA 2023	TW2	% thd target 2023
3	SK3. Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP						
	IK3. Data dan informasi logistik hasil KP (Data)	Unit	PA	-	2	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BMA Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP dengan pagu awal sebesar Rp 1.467.500.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp440.250.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp341.776.731,- atau sebesar 23,29% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

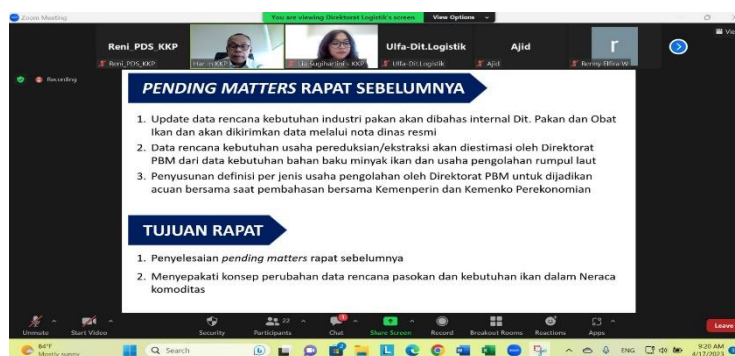
3.1. Rapat Evaluasi Neraca Komoditas Triwulan I

Rapat evaluasi neraca komoditas perikanan triwulan 1 dilaksanakan pada hari Senin, 17 April 2023 di RR Cakalang, GMB 3. Rapat dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan dan dihadiri oleh anggota tim penyusun Neraca Komoditas Perikanan (NKP) lingkup KKP. Tujuan rapat adalah melakukan evaluasi terhadap NK triwulan I.

Hasil :

- Pertunya surat dari Direktur Jenderal PDSPKP kepada Kemenko Bidang perekonomian terkait perubahan NK tahun 2023

Dokumentasi Rapat Evaluasi Neraca Komoditas Triwulan I



3.2. Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan Pasokan Bahan Baku Pemindangan

FGD pemantauan pasokan bahan baku pemindangan dilaksanakan pada hari jum'at, 23 Juni 2023 di Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya. Rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh perwakilan pelaku usaha pemindangan dari wilayah Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan FGD adalah melakukan pemantauan terhadap pasokan bahan baku pindang. Berikut beberapa hal yang dibahas dalam rapat.

a. Arahan Direktur Logistik

- 1) Pemetaan rantai pasokan bahan baku pemindangan yang masuk ke Kota Tasikmalaya dari mulai kebutuhan baku jenis pemindangan, ukuran, harga pengiriman bahan baku, asal pasokan bahan baku, wilayah pemasaran.
- 2) Update data pelaku usaha pemindangan yang ada di wilayah Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya pada aplikasi KUSUKA
- 3) Penguatan data valid yang berasal dari daerah sangat penting untuk pengambilan kebijakan Kementerian
- 4) Pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan terkait permodalan program pemerintah yang membantu usaha Mikro kecil supaya kegiatan usahanya semakin maju.

b. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya

- 1) Secara geografis Kota Tasikmalaya merupakan Kota yang menjadi pusat perbelanjaan dari beberapa Kota/ Kabupaten yang berada diperbatasannya karena mempunyai pasar induk Cikurubuk yang menjadi perbelanjaan dari Kota Ciamis, Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Inflasi di kota tasik termasuk kategori tinggi untuk beberapa komoditas bahan pokok

c. Koordinator Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan

- 1) Dinas Perikanan Kabupaten/ Kota diharapkan dapat memperbaharui data terkait para pelaku usaha pemindangan yang berada di wilayah kerjanya untuk pemetaan pasokan bahan baku
- 2) Intervensi Kementrian kepada pelaku usaha yang terdapat di Direktorat Logistik yaitu Bantuan Pemerintah dalam bentuk Gudang Beku dan Mobil berpendingin
- 3) Gudang beku 1.000 ton yang dikelola oleh Direktorat Logistik menyediakan ikan bahan baku dengan peruntukan pemindangan seperti ikan layang, cakalang, deho dan kembung.
- 4) Dinas Perikanan Kabupaten Tasikmalaya diharapkan melakukan pendampingan terhadap persiapan yang mendapatkan bantuan pemerintah gudang beku

- d. Pengolah Ikan Pindang Kabupaten Garut
Pasokan bahan baku berasal dari Jakarta, Bahan Baku yang digunakan untuk pemindangan antara lain: Layang, Tongkol, Bandeng, Salem, Deho. Pembelian Bahan Baku 2 hari sekali dengan kapasitas 2,5 ton/hari. Kebutuhan daerah Limbangan sebesar 4 ton perhari
- e. Pengolah Ikan Pindang Kota Tasikmalaya
Pasokan bahan baku berasal dari Jakarta. Bahan Baku yang digunakan untuk pemindangan antara lain: Layang, Tongkol, Bandeng, Salem, Deho. Pembelian bahan baku 2 hari sekali, dengan kapasitas 2,5 ton/hari
- f. Pengolah Ikan Pindang Kabupaten Tasikmalaya
Pasokan bahan baku berasal dari Jakarta. Bahan Baku yang digunakan untuk pemindangan antara lain: Layang, Tongkol, Bandeng, Salem, Deho. Pembelian bahan baku 2 hari sekali, dengan kapasitas 3 ton/hari. Harga ikan salem di tingkat supplier Rp18.500,- – Rp19.000,-
- g. Kendala yang dihadapi
Penyimpanan untuk bahan baku masih terbatas. Harga garam naik yang semula Rp70.000,-/sak menjadi Rp300.000,-/sak

Dokumentasi Focus *Group Discussion* (FGD) Pemantauan Pasokan Bahan Baku Pemindangan



3.3. Laporan Perkembangan Pasokan, Harga, Stok Ikan dan Inflasi Periode Mei 2023

Dalam upaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan ikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap data dan informasi logistik ikan. Untuk itu, Direktorat Logistik telah membentuk Tim Pemantauan Logistik Ikan yang melibatkan unit kerja terkait. Tugas dari tim tersebut diantaranya menyiapkan dan menganalisis data produksi perikanan yang bersumber dari kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, ketersediaan (stok) ikan di *Cold Storage* (CS) serta data inflasi yang disebabkan oleh komoditas perikanan serta data lainnya yang terkait dengan logistik hasil perikanan.

A. Analisis Produksi Perikanan Tangkap

Volume produksi perikanan tangkap bersumber dari web Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). Total volume pendaratan ikan berdasarkan data PIPP pada Bulan Mei 2023 adalah sebesar 36.065 ton yang berasal dari 104 pelabuhan, menurun 40,13% dibandingkan bulan April 2023 sebesar 60.238 ton yang berasal dari 97 pelabuhan. Volume produksi perikanan tangkap berdasarkan pelabuhan pendaratannya (10 besar) tersaji pada grafik berikut:



Sumber : PIPP

Gambar 6. Grafik Volume Pendaratan Ikan Bulan Mei di 10 Besar Pelabuhan Perikanan di Indonesia

Tabel 6. Komoditas Utama 10 Pelabuhan Perikanan dengan Volume Pendaratan Ikan Terbesar Bulan Mei 2023

Nama Ikan	Volume (Ton)		Persentase Kenaikan /Penurunan
	April	Mei	
Layang	9.736,23	6.753,88	-30,63%
Cakalang	8.578,48	6.210,98	-27,60%
Tongkol	5.214,62	2.709,86	-48,03%
Madidihang	3.521,90	2.657,32	-24,55%
Cumi-Cumi	2.637,30	1.483,85	-49,41%
Swangi	2.933,31	1.397,98	-46,99%
Lemuru	2.624,66	1.290,51	-50,83%
Kurisi	1.937,58	1.135,94	-45,23%
Selar	1.965,68	965,32	-50,89%
Siro	2.073,95	918,36	-52,60%

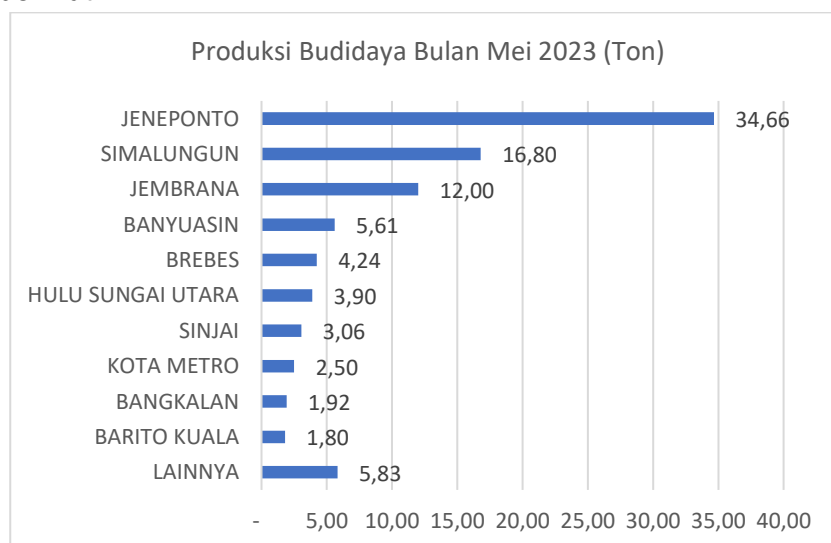
Tabel 7. Harga Rata-Rata Beberapa Komoditas Ikan di Tingkat Produsen Bulan April 2023 dan Mei 2023

Jenis Ikan	Harga Rata-Rata Tingkat Produsen (Rp/Kg)		Persentase Kenaikan/Penurunan Harga (%)
	April	Mei	
Kerapu	53.200	59.700	12,22%
Baronang	32.600	34.000	4,29%
Gabus	13.000	13.600	4,62%
Biji Nangka	11.900	15.100	26,89%
Cakalang	17.100	18.600	8,77%
Cumi-Cumi	49.900	54.800	9,82%
Gurita	29.300	28.200	-3,75%
Kembung	22.900	22.500	-1,75%
Kuwe	32.800	36.800	12,20%
Layang	16.900	18.400	8,88%
Madidihang	29.300	30.300	3,41%
Tenggiri	48.100	49.900	3,74%
Tongkol	15.900	16.900	6,29%
Tuna	25.200	27.700	9,92%
Manyung	23.000	20.900	-9,13%

Sumber :
PIPP

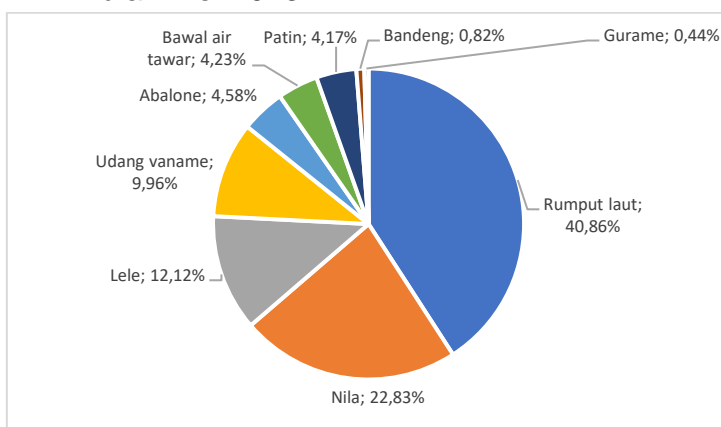
B. Volume Produksi Perikanan Budidaya

Volume produksi perikanan budidaya bersumber dari Satu Data, KKP. Total volume produksi budidaya berdasarkan Satu Data pada Bulan Mei 2023 adalah sebesar 92,30 ton yang berasal dari 20 kab/kota, menurun 57,46% dibandingkan bulan April 2023 sebesar 160,63 ton yang berasal dari 39 kab/kota. Volume produksi perikanan budidaya berdasarkan kab/kota (10 besar) pada Bulan Mei 2023 tersaji pada grafik berikut:



Sumber: Satu Data, KKP

Gambar 7. Grafik Volume Produksi Ikan Budidaya di 10 Besar Provinsi Bulan Mei 2023



Sumber: Satu Data, KKP

Gambar 8. Diagram Lingkaran Persentase Volume Ikan Budidaya Bulan Mei 2023

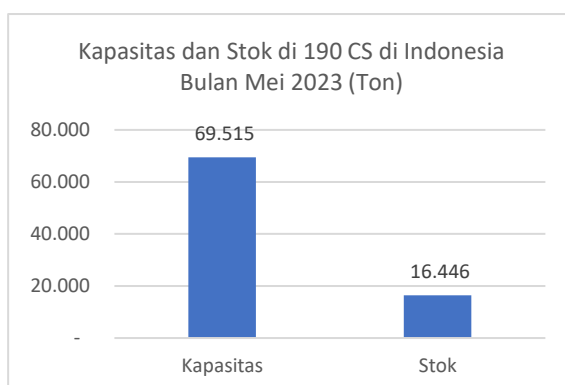
Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis jenis ikan budidaya yang dominan pada bulan Mei berturut-turut yaitu rumput laut (40,86%), nila (22,83%), lele (12,12%), udang vaname (9,96%), abalone (4,58%), bawal air tawar (4,23%), patin (4,17%), bandeng (0,82%), dan gurame (0,44%)

Tabel 8. Harga Rata-Rata Komoditas Ikan di Tingkat Pembudidaya Bulan April dan Mei 2023

Komoditas	April	Mei	Persentase Kenaikan/Penurunan Harga (%)
Abalone	27.800	24.700	-11,15%
Bandeng	27.000	20.500	-24,07%
Bawal air tawar	17.000	17.500	2,94%
Gurame	39.500	33.000	-16,46%
Lele	19.800	19.200	-3,03%
Patin	19.200	17.300	-9,90%
Udang vaname	53.200	53.500	0,56%
Nila	26.400	27.500	4,17%

C. Stok Ikan di 190 Cold Storage (CS)

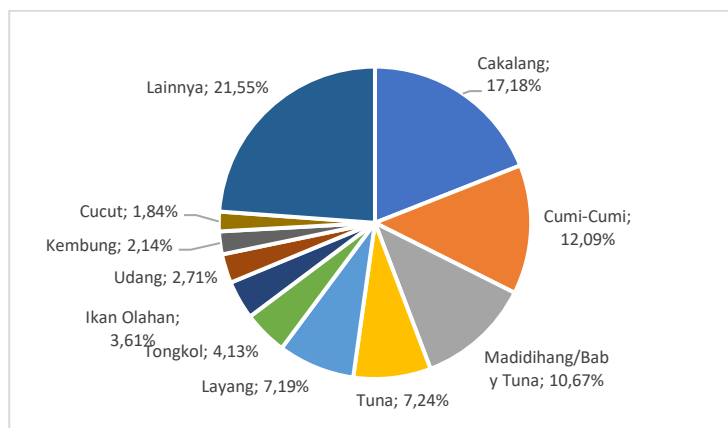
Berdasarkan pendataan stok ikan di CS yang dilakukan oleh tim pusat maupun enumerator daerah, pada Bulan Mei telah terkumpul data stok ikan di 190 CS milik pemerintah, BUMN dan swasta yang tersebar di 60 kabupaten/kota di Indonesia sebesar 16.446 ton (23,66%) dari total kapasitas 69.515 ton.



Gambar 9. Grafik Volume Kapasitas dan Stok di 190 CS di Indonesia Bulan Mei 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis jenis ikan dominan yang tersimpan di CS pada bulan Mei berturut-turut yaitu jenis ikan cakalang (17,18%), cumi-cumi (12,09%), madidihang/baby tuna (10,67%), tuna (7,24%), layang (7,19%), tongkol (4,13%), ikan olahan (3,61%), udang (2,71%), kembung (2,14%), cucut (1,84%), dan sisanya 21,55% merupakan ikan lainnya.

Komposisi Stok Berdasarkan Jenis Ikan Bulan Mei 2023 (%)



Sumber: Data Primer Diolah

Gambar 10. Komposisi Stok Berdasarkan Jenis Ikan (%) Bulan Mei 2023

Harga rata-rata ikan di tingkat CS pada bulan Mei 2023 yang mengalami penurunan harga antara lain ikan bandeng, cakalang, cumi-cumi, tongkol, kembung dan udang dengan penurunan tertinggi ikan cakalang sebesar 15,95%. Sementara itu komoditas ikan yang mengalami kenaikan harga antara lain ikan madidihang/baby tuna, kakap merah, layang dan salem dengan kisaran penurunan harga 6-35 persen.

Tabel 9. Harga Rata-rata Beberapa Jenis Ikan di Tingkat CS Bulan April dan Mei 2023

Jenis Ikan	Harga Rata-rata (Rp/Kg)		Kenaikan/Perunan (%)
	April	Mei	
Madidihang/Baby Tuna	15.000	20.200	34,67%
Bandeng	23.800	21.000	-11,76%
Cakalang	23.200	19.500	-15,95%
Cumi-cumi	63.000	58.900	-6,51%
Tongkol	23.900	23.300	-2,51%

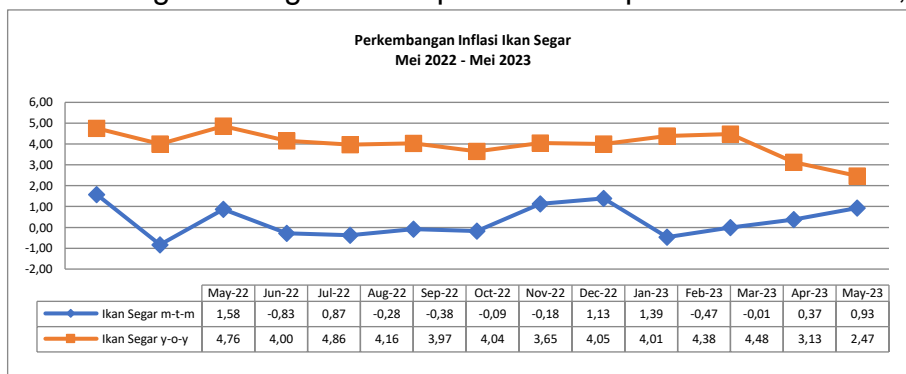
Jenis Ikan	Harga Rata-rata (Rp/Kg)		Kenaikan/Perunan (%)
	April	Mei	
Kakap Merah	64.200	68.100	6,07%
Kembung	35.000	34.600	-1,14%
Layang	21.200	22.800	7,55%
Salem	19.300	22.100	14,51%
Udang	104.000	91.900	-11,63%

Sumber: Data Primer Diolah

D. Inflasi

1. Inflasi Kelompok Ikan Segar (Nasional)

Secara bulanan, kelompok ikan segar mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 0,93 persen pada bulan Mei 2023, dimana pada bulan sebelumnya juga mengalami inflasi sebesar 0,37 persen pada bulan April 2023. Sementara itu, secara tahunan, kelompok ikan segar mengalami inflasi sebesar 2,47 persen pada bulan Mei 2023, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan April 2023 sebesar 3,13 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)

Gambar 11. Perkembangan Inflasi Ikan Segar Bulan Mei 2021-Mei 2023

2. Inflasi Bulan ke Bulan dan Inflasi Tahun ke Tahun Beberapa Komoditas Ikan Segar

Pada bulan Mei 2023, komoditas ikan bandeng, cakalang, kembung, layang dan tongkol mengalami inflasi atau kenaikan harga dengan inflasi tertinggi adalah ikan cakalang sebesar 3,42 persen. Sementara itu komoditas ikan tuna menjadi satu-satunya komoditas ikan bahan pokok yang mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,21 persen. Secara tahunan, komoditas ikan bahan pokok yang mengalami inflasi adalah bandeng, cakalang, kembung dan tongkol dengan inflasi terbesar adalah ikan cakalang sebesar 11,59 persen, sedangkan ikan layang dan tuna mengalami deflasi masing-masing sebesar 1,40 persen dan 0,24 persen.

Tabel 10. Inflasi Ikan Segar Bulan ke Bulan (m-t-m)

Komoditas	Inflasi Bulan ke Bulan												
	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23
Bandeng	0,82	-2,09	0,80	-0,84	0,74	0,91	-0,63	1,23	1,14	-1,21	-0,20	1,06	0,22
Cakalang	1,89	-1,30	2,85	3,68	-0,10	-4,10	0,03	3,44	4,75	0,94	-2,98	0,82	3,42
Kembung	2,16	-1,30	2,30	-0,37	0,17	0,96	0,11	0,91	1,06	-0,90	0,37	-0,42	0,92
Layang	2,61	-1,33	3,78	-0,97	-6,75	-1,63	2,77	-0,36	4,95	-3,42	0,62	-1,40	2,94
Tongkol	2,55	1,53	0,40	-1,76	-0,28	0,63	0,04	1,74	1,42	0,56	-1,34	-1,10	2,08
Tuna	0,82	-0,23	2,11	-0,02	0,03	-0,09	-0,55	0,13	0,89	-1,29	-1,14	0,16	-0,21

Sumber : Badan Pusat Statistik

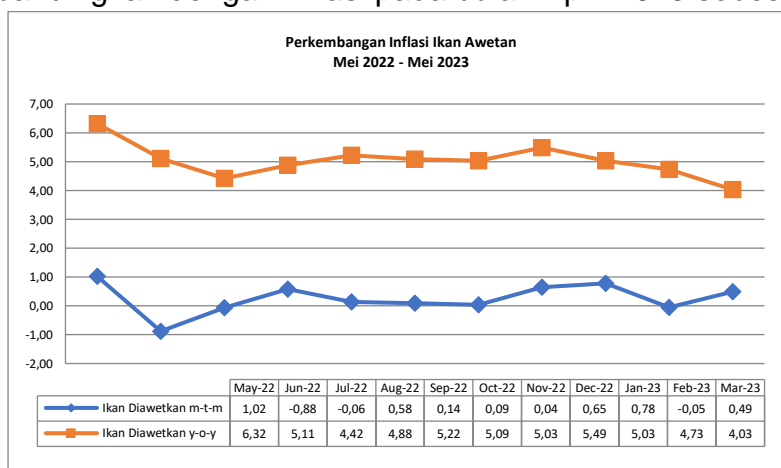
Tabel 11. Inflasi Ikan Segar Tahun ke Tahun (y-o-y)

Komoditas	Inflasi Tahun ke Tahun												
	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23
Bandeng	3,51	2,86	3,82	2,68	3,46	5,41	3,26	4,77	3,99	2,27	1,37	1,68	1,08
Cakalang	0,70	1,03	1,57	4,44	7,00	0,65	0,20	1,99	6,25	11,21	11,00	9,95	11,59
Kembung	4,88	2,73	5,00	3,29	3,15	4,46	4,82	5,64	6,69	6,07	7,51	5,10	3,83
Layang	4,35	1,19	3,58	1,74	-4,53	-4,76	-2,74	-0,85	1,29	1,73	2,46	-1,71	-1,40
Tongkol	8,44	10,08	10,94	7,07	6,87	7,62	7,38	6,39	5,12	7,08	5,15	4,39	3,92
Tuna	6,52	5,82	7,42	8,18	7,90	7,57	6,33	4,65	3,61	1,46	0,35	0,78	-0,24

Sumber : Badan Pusat Statistik

3. Inflasi Kelompok Ikan Diawetkan (Nasional)

Secara bulanan, kelompok ikan diawetkan mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 0,84 persen pada bulan Mei 2023, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan April 2023 sebesar 0,42 persen. Sementara itu, secara tahunan, kelompok ikan diawetkan mengalami inflasi sebesar 3,07 persen pada bulan Mei 2023, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan April 2023 sebesar 3,26 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)

Gambar 12. Perkembangan Inflasi Ikan Diawetkan Bulan Mei 2021-Mei 2023

4. Komoditas Ikan Segar Penyumbang Andil Inflasi Terbesar Nasional

Beberapa komoditas ikan yang memberikan andil inflasi terbesar terhadap inflasi umum nasional pada bulan Mei 2023 yaitu:

- a. Dencis. Wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk dencis berada di Kota Gunung Sitoli, Medan dan Lhokseumawe
- b. Tongkol. Wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk tongkol berada di Kota Tanjung Pandan, Dumai dan Mataram.
- c. Layang. Wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk layang berada di Kota Bau-Bau, Ambon dan Samarinda
- d. Kembang. Wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk kembang berada di Kota Ambon. Kupang dan Tanjung Pandan
- e. Cakalang. Wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi untuk cakalang berada di Kota Dumai, Sampit dan Sibolga.

Tabel 12. Komoditas Ikan Segar Penyumbang Andil Inflasi Terbesar Nasional

Nama Komoditas	Inflasi Bulanan	Andil Inflasi
Dencis	9,16	0,0051
Tongkol	2,08	0,0040
Layang	2,94	0,0027
Kembang	0,92	0,0026
Cakalang	3,42	0,0023

E. Analisis Keterkaitan Produksi dan Inflasi

Volume pendaratan ikan cakalang berdasarkan data dari PIPP pada bulan Mei 2023 mengalami penurunan sebesar 27,60% dibandingkan bulan April 2023. Penurunan produksi ikan cakalang dianalisis sebagai faktor yang menyebabkan komoditas ikan cakalang mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 3,42% pada bulan Mei 2023.

Volume pendaratan ikan kembang berdasarkan data dari PIPP pada bulan Mei 2023 mengalami penurunan sebesar 40,92% dibandingkan bulan April 2023. Penurunan produksi ikan kembang dianalisis sebagai faktor yang menyebabkan komoditas ikan kembang mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 0,92% pada bulan Mei 2023.

Volume pendaratan ikan layang berdasarkan data dari PIPP pada bulan Mei 2023 mengalami penurunan sebesar 30,63% dibandingkan bulan April 2023. Penurunan produksi ikan layang dianalisis sebagai faktor yang menyebabkan komoditas ikan layang mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 2,94% pada bulan Mei 2023.

Volume pendaratan ikan tongkol berdasarkan data dari PIPP pada bulan Mei 2023 mengalami penurunan sebesar 48,03% dibandingkan bulan April 2023. Penurunan produksi ikan tongkol dianalisis sebagai faktor yang menyebabkan komoditas ikan tongkol mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 2,08% pada bulan Mei 2023.

3.2.4. Sasaran Kegiatan Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik

4. Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Lembaga pengelola logistik pusat yang difasilitasi dan melibatkan pelaku usaha dalam rangka penataan rantai pasok. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok

Σa :

Jumlah Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok

Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan target pada Triwulan IV sebesar 1 lembaga.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 13. Target dan capaian IK 4

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				sdTW2	TA 2023	TW2	% thd target TW4
4	SK4. Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik						
	IK4. Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga) dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment*

(AA) sebesar Rp300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp261.600.878,- atau sebesar 26,16% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

4.1. Rapat Pembahasan Laporan Progress Pengembangan Koridor Logistik untuk Mendukung Program Prioritas KKP

Rapat dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 27 Juni 2023 di Bogor, dibuka oleh Direktur Logistik dan selanjutnya dipandu oleh Koordinator Tata Niaga serta dihadiri oleh: Tenaga Ahli Bapak Sugeng Hari Wisudo (secara *online*), JFT Utama Pembina Mutu Direktorat Logistik, JFT Madya Pembina Mutu dan APHP lingkup Direktorat Logistik, serta Kelompok lingkup Direktorat Logistik.

1. Tujuan pertemuan adalah:
 - a) Menyampaikan hasil penghitungan koridor/subkoridor potensial,
 - b) Menyampaikan rencana model pengembangan koridor logistik ikan yang telah dilakukan berdasarkan scoring penghitungan dan kebijakan KKP,
 - c) Menyiapkan bahan laporan ke pimpinan berdasarkan hasil analisa dan pelaksanaan kegiatan SLIN 2020-2023,
 - d) Membahas draft regulasi penetapan pengembangan koridor logistik ikan nasional.
2. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan rapat antara lain:
 - a) Penentuan koridor/subkoridor potensial menggunakan model penghitungan dengan pembobotan per kriteria dan total pembobotan 100%. Setiap kriteria menggunakan skor 1-4 yang penyusunan kelasnya diseragamkan berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari data yang didapatkan. Untuk mendapatkan nilai akhir maka skor dikalikan dengan bobot. Bobot ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Daerah yang dipilih dengan nilai 2,5-4,0.
 - b) Kriteria yang digunakan antara lain:
 - komoditas penentu (nilai ikan hidup dan volume ikan segar),
 - wilayah (jumlah lokasi kampung budidaya, jumlah lokasi kampung nelayan maju (kalaju), jumlah pelabuhan perikanan, nilai *Location Quotient* (perbandingan kontribusi PDRB sektor perikanan terhadap semua sektor di suatu daerah, dengan kontribusi PDB sektor perikanan terhadap semua sektor nasional), dan
 - konektivitas (performa nilai yang ditransportasikan via darat, laut dan udara).
 - c) Hasil dari penilaian sementara terdapat beberapa daerah sangat potensial untuk titik asal pengumpulan selain dari koridor yang sudah ada, antara

- lain: Medan (Sumatera Utara), Tarakan (Kalimantan Utara), Kupang (NTT), Kalianda (Lampung), Mataram (NTB), Banda Aceh (Aceh), Karimun (Kepulauan Riau), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Pati (Jawa Tengah).
- d) Berdasarkan masukan peserta rapat usulan daerah titik asal pengumpulan baru antara lain: **Medan (mewakili Sumatera), Tarakan (mewakili Kalimantan), Kupang (mewakili Nusa Tenggara-Bali) dan Merauke (Papua Selatan)**. Adapun Merauke tetap dimasukkan walaupun secara perhitungan belum masuk, karena merupakan daerah percontohan dalam pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur.
- e) Berdasarkan hal tersebut usulan sementara pengembangan koridor baru antara lain meliputi:
- (1) Koridor Ambon – Jakarta/Surabaya/Makassar;
 - (2) Koridor Bitung – Jakarta/Surabaya/Makassar;
 - (3) Koridor Mimika – Jakarta/Surabaya;
 - (4) Koridor Makassar – Jakarta/Surabaya;
 - (5) Koridor Kendari – Jakarta/Surabaya/Makassar;
 - (6) Koridor Medan – Jakarta/Surabaya;
 - (7) Koridor Kupang – Jakarta/Surabaya/Makassar;
 - (8) Koridor Merauke – Jakarta/Surabaya;
 - (9) Koridor Tarakan – Jakarta/Surabaya/Makassar.
3. Penetapan koridor diusulkan agar diatur dalam aturan yang lebih tinggi yaitu Keputusan Menteri, sehingga diharapkan dapat menjadi perhatian lingkup Eselon I lingkup KKP.
4. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah rapat internal Direktorat Logistik untuk penguatan justifikasi dan penyiapan laporan rencana pengembangan logistik ikan nasional kepada pimpinan Ditjen PDSPKP.

**Dokumentasi Rapat Pembahasan Laporan Progress
Pengembangan Koridor Logistik untuk Mendukung Program
Prioritas KKP**



5. Indikator Kinerja Kegiatan Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan)

Definisi indikator ini adalah Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas. Pemasukan hasil perikanan adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku nasional. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) rekomendasi kebijakan dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas

Σa :

Jumlah Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas

Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 14. Target dan capaian IK 5

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TW2	TA 2023	TW2	% thd target 2023
5	SK4. Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik						
	IK5. Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada

1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu ABR Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi kebijakan) dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp345.221.292,- atau sebesar 34,52% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

5.1. Rapat Pembahasan Lanjutan Rencana Kegiatan Analisis Kebutuhan Impor Komoditas Perikanan untuk Bahan Baku Usaha Pemindangan

Dalam periode TW II, rapat dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu 2 kali pada April, 1 kali di Mei dan 2 kali di Juni. Rapat dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023, dipimpin oleh Direktur Jenderal PDSPKP, dengan menghadirkan Direktur Logistik dan tenaga ahli Bapak Purwanto, serta Pejabat Fungsional Pembina Mutu HKP Ahli Utama dan perwakilan dari: Setditjen PDSPKP, Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Pemasaran, Balai Besar P3KP.

1. Latar belakang:

- a. Usaha Pemindangan memegang peranan strategis (aspek sosial ekonomi: serapan tenaga kerja, upah dan nilai tambah)
 - b. Kebutuhan BB Pemindangan rata-rata mengalami peningkatan 6% per tahun.
 - c. Tantangan penyediaan BB Pemindangan: logistik, hasil tangkapan yang sangat dipengaruhi pola musim penangkapan ikan, cuaca dan kondisi oceanografi (La Nina/El Nino)
 - d. SLIN menjadi solusi jangka pendek dan Panjang, namun dalam hal ketersediaan dalam negeri tidak mencukupi, perlu upaya alternatif penyediaan bahan baku melalui pemasukan (impor) dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sektor hulu-hilir perikanan
 - e. Analisis kondisi pasokan dan kebutuhan bahan baku usaha pemindangan perlu dilakukan sebagai langkah untuk menyusun alternatif strategi tata kelola pemasukan bahan baku pemindangan.
2. Tujuan pelaksanaan kegiatan kajian analisis kebutuhan impor komoditas perikanan untuk bahan baku usaha pemindangan adalah sebagai berikut:
- a. Menganalisis pasokan ikan untuk bahan baku usaha pemindangan.
 - b. Menganalisis kebutuhan ikan untuk bahan baku usaha pemindangan.
 - c. Menganalisis proyeksi kebutuhan impor komoditas perikanan untuk bahan baku usaha pemindangan.
 - d. Menyusun model distribusi bahan baku pemindangan yang efisien.

3. Metodologi analisis menggunakan: analisis deskriptif kuantitatif dan model optimisasi matematika yang disusun berdasarkan model transportasi (Thompson & Thore, 1992; Hillier & Lieberman, 2015; Rosenthal, 2016).
4. Strategi dan rencana aksi yang disusun berdasarkan hasil analisis adalah :
 - a. Terkait peningkatan produksi sebesar 6%, itu dihitung dengan cara sampling penghitungan Volume Produk Olahan (VPO), dan diperoleh hasil penghitungan bahwa jumlah UPI turun, namun kapasitas produksi secara agregat meningkat, sehingga total produksi juga meningkat. Perlu dicermati lebih lanjut, berapa margin error pada penghitungannya, agar tidak terjadi bias
 - b. Perlu dicermati preferensi konsumen selama 3 tahun terakhir, berdasarkan tren, provinsi A, preferensi pindang adalah jenis ikan X (lihat kuadrannya).
 - c. Direktorat PBM sudah sampling sejumlah 5.722 UPI pindang dengan jumlah sample 8.572. Hasil pengolahan data dan analisis, diketahui bahwa salem hanya menyumbang 7% dari keseluruhan bahan baku. 10 besar bahan baku pindang berturut-turut adalah: layang, tongkol, bandeng, cakalang, kembung, lemuru, semar, sero, tengiri dan tembang. 10 besar tersebut mencapai 92% dari keseluruhan produksi pindang. Terdapat perbedaan data dengan data yang pernah disampaikan di memo tertanggal 8 Februari 2023, dikarenakan saat itu data yang digunakan adalah produksi bulan Jan-Juni 2022; sedangkan data yang digunakan saat ini berdasarkan data Jan-Des 2022
 - d. Pada tahun 2021 Direktorat PBM tidak melakukan sampling. Sampling baru dilakukan sejak 2022. Tahun 2023 sampling dilanjutkan oleh bagian data Setditjen, namun anggaran masih diblokir
 - e. Terhadap data pemindang 120 UPI pemindangan di Sumatera Selatan, perlu diklarifikasi lebih lanjut. Mengingat di Sumatera Selatan ada masakan pindang dengan cara pengolahan dan penyajian yang berbeda dengan pindang garam atau pindang air garam pada umumnya. Demikian juga di wilayah lainnya
5. Perlu dilakukan analisis keekonomian usaha pemindangan dan analisis pasok bahan baku pemindangan pasca penerapan PIT;
6. Perlu dilakukan kesesuaian penghitungan bahan baku pindang antara direktorat PBM dengan Direktorat logistik.

Dokumentasi Rapat Pembahasan Lanjutan Rencana Kegiatan Analisis Kebutuhan Impor Komoditas Perikanan untuk Bahan Baku Usaha Pemindangan



5.2. Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Neraca Komoditas (NK) Tahun 2023.

Direktorat Jenderal PDSPKP melakukan pemutakhiran data Rencana Kebutuhan (RK) komoditas perikanan tahun 2023 yang telah disampaikan Pelaku Usaha pada Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) yang terintegrasi dengan Sistem Neraca Komoditas (NK) Perikanan, dengan membuka Gerai NK Perikanan. Dalam periode TW II telah dilakukan pembahasan sebanyak 11 kali di Jakarta. Kegiatan dipimpin oleh Koordinator Kelompok Tata Niaga dan tim verifikasi yang terdiri dari perwakilan tim Direktorat Logistik, tim perwakilan dari Perwakilan Setdijen PDSPKP; Perwakilan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; Perwakilan Kepala Pusat Karantina Ikan; Perwakilan Direktur Pengolahan dan Bina Mutu; Perwakilan Direktur Pemasaran; Perwakilan Direktur Usaha dan Investasi. Tujuan rapat adalah untuk optimalisasi kegiatan pemutakhiran data, setiap pelaku usaha harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib dihadiri oleh pihak Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan. Waktu kehadiran sesuai dengan jadwal yang diinformasikan kepada masing-masing perusahaan.
- b. Membawa data dukung meliputi:
 - Bukti penguasaan gudang berupa bukti kepemilikan atau sewa, Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan/atau dokumen lainnya yang memuat deskripsi domisili gudang dan kapasitas gudang.
 - Realisasi impor dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tahun 2023.
 - Pencatatan dan bukti penjualan hasil perikanan impor tahun 2023.
 - Nomor Induk Berusaha (NIB).

- Status Konfirmasi Status Wajib pajak (KSWP).
 - Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP).
- c. Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan akan menandatangani Pakta Integritas yang disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Pihak Perusahaan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Dokumentasi Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Neraca Komoditas (NK) Tahun 2023



5.3. Rapat dalam rangka penguatan tata kelola neraca komoditas perikanan dan Sosialisasi tentang Neraca Komoditas Perikanan.

Dalam rangka penguatan tata kelola neraca komoditas perikanan dan Sosialisasi tentang Neraca Komoditas Perikanan kepada APIP KKP, Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal PDSPKP akan mengadakan Sosialisasi Neraca Komoditas Perikanan pada Jumat, 19 Mei 2023 jam 13.30 di ruang rapat lt 2 raiser ikan hias cibinong Bogor.

Pertemuan dibuka oleh Plt. Inspektur Jenderal KKP, dihadiri staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, inspektur bidang 4, para auditor utama dan auditor irbid 4, perwakilan ditjen perikanan tangkap, ditjen perikanan budidaya, dan tim Direktorat Logistik. Tujuan rapat adalah penguatan tata kelola neraca komoditas perikanan dan Sosialisasi tentang Neraca Komoditas Perikanan.

Pada pertemuan tim ditlog menyampaikan paparan terkait tata kelola neraca komoditas (NK) dan pelaksanaan NK sampai TW 1. Stafsus, dan tim itjen mengapresiasi penguatan tata kelola NK yang dilakukan oleh PDS terkait perbaikan mekanisme pendataan, koordinasi dengan es 1 KKP terkait, integrasi sistem dan pelayanan kepada pelaku

usaha. Perlu dilakukan pembahasan kembali untuk lebih menguatkan peran es 1 KKP dan es 2 PDS dalam pelaksanaan NK.

Dokumentasi Rapat dalam rangka penguatan tata kelola neraca komoditas perikanan dan Sosialisasi tentang Neraca Komoditas Perikanan



1.2.5. Sasaran Kegiatan Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi

6. Indikator Kinerja Kegiatan Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)

Definisi indikator ini adalah Inisiasi kerja sama antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dalam bentuk kemitraan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X : Dokumen kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dalam bentuk kemitraan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan

Σa : Jumlah dokumen kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dalam bentuk kemitraan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan

Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis

perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan sampai dengan Triwulan II tercapai 9 Kesepakatan.

Capaian sampai dengan TW II adalah sebesar 11 Kesepakatan atau 122,2% dari target. Adanya peningkatan capaian sebanyak 6 kesepakatan dari periode TW I atau peningkatan 2 kesepakatan dari target sampai dengan TW II. Hal ini disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran kegiatan untuk mendapatkan capaian lebih. Selain itu telah dilakukan kordinasi awal dengan pelaku usaha perikanan untuk dilakukan kesepakatan bersama dalam pengelolaan gudang beku.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 15. Target dan capaian IK 6

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW2	TA 2023	Sd TW2	% thd target sd TW4
6	SK5. Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi						
	IK6. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	Kesepakatan	PA	9	18	11	61,11

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan Dalam rangka pengadaan dan penyimpanan dengan pagu awal sebesar Rp 900.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp270.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp334.831.084,- atau sebesar 37,20% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

6.1. **Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan Hasil Perikanan**

Focus Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Pengadaan dan Penyimpanan Hasil Perikanan dalam rangka hilirisasi peningkatan daya saing

produk kelautan dan perikanan melalui kerjasama kemitraan antar pelaku usaha serta optimalisasi pemanfaatan asset bantuan pemerintah pada Direktorat Logistik sekaligus Penandatanganan Kesepakatan Bersama dalam rangka kemitraan pada tanggal 04 April 2023 bertempat di Ruang Anthurium Hotel Onih, Paledang, Kota Bogor. Tujuan dilaksanakan kegiatan FGD adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuat jejaring komunikasi dan arus ketersediaan hasil perikanan dalam negeri di sepanjang rantai pasok;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan Cold Storage (Gudang Beku) yang telah dibangun Pemerintah untuk menyimpan hasil perikanan;
- c. Meningkatkan Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kelautan dan Perikanan.

Acara dibuka oleh Koordinator Pengadaan dan Penyimpanan dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, Pelaku Usaha Perikanan dan Pengelola Gudang Beku Portable, Korkel Distribusi, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi, Perwakilan bagian Program, bagian Hukum dan Kerjasama, Subkorkel Pengadaan, Subkorkel Penyimpanan, Subkorkel Penguatan Distribusi, Perwakilan Korkel Tata Niaga dan Korkel Pemetaan dan Pemantauan, Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia dan PT Dua Putra Perkasa, PT Aruna Indonesia dan KPL Mina Sumitra

1. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dalam rangka kemitraan antara dengan Pelaku Usaha Hasil Perikanan diantaranya :PT. Emira Bhaskara Industri; PT. Rantai Pasok Teknologi (Fishlog); PT. Aruna Jaya Nuswantara; PT. Spektra Tirta Sakti; KPL Mina Sumitra (Indramayu); Poklhasar Aromajaya Blanakan (Subang).
2. *Output* kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Fasilitasi Pengadaan dan Penyimpanan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut :
 - a. Tersedianya informasi potensi dan volume hasil perikanan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dapat dipasarkan hingga ke luar negeri maupun ke seluruh wilayah Indonesia;
 - b. Terjalinnnya kerjasama antar pelaku usaha dalam pemenuhan pasokan hasil perikanan dalam bentuk penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - c. Gambaran informasi rantai pasok hasil perikanan dalam pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan yang efektif dan sesuai dengan prinsip penerapan sistem rantai dingin.
3. Berikut ini adalah resume hasil diskusi *Focus Group Discussion* (FGD) kemitraan dalam rangka Pengadaan dan Penyimpanan Hasil Perikanan di Daerah:
 - a. Penyimpanan bahan baku merupakan salah satu upaya dari sistem rantai dingin dalam penanganan ikan yang bertujuan untuk menjaga

- produk dalam lingkungan dengan temperatur tertentu agar produk tetap terjaga dalam mutu dan kualitas yang baik.
- b. Di Jawa Barat terdapat 6525 unit pengolah ikan, yang terdiri dari 6436 umkm dan 89 industri skala menengah besar. dengan jenis produksi yang dominan, untuk ikan hasil tangkap adalah tuna, cakalang tongkol. sedangkan hasil budidaya adalah ikan nila, lele dan ikan mas.
 - c. Optimalisasi penggunaan asset Barang Milik Negara (BMN) pada Direktorat Logistik untuk penyimpanan ikan harus memperhatikan prinsip penanganan dan penyimpanan ikan yang baik dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - d. Meningkatkan pemahaman dan informasi fungsi fungsi gudang beku beserta komponen yang menjadi bagian dari gudang beku, dimana penyimpanan ikan segar tidak boleh langsung masuk ke dalam gudang beku karena ikan segar memiliki suhu tinggi yang membawa panas sehingga akan menjadi penyebab evaporator membeku.
 - e. Dalam teknis penyimpanan ikan pada gudang beku perlu memperhatikan suhu dan kondisi ikan, dimana jika suhu tidak sesuai dengan standar dan ikan dalam kondisi tidak beku akan dapat menyebabkan kerusakan pada ikan yaitu mengalami susut berat dan mengalami kekeringan sedangkan untuk mesin pendingin dapat mengalami kerusakan atau blocking pada evaporatornya.
 - f. Pengelolaan BMN *Cold Storage* 1000 ton dapat menggunakan dasar penerimaan PNB secara bersama yaitu PP 85 tahun 2021 yaitu jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik dengan ketentuan dapat dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - g. Dalam pengelolaan gudang beku harus memperhatikan volume dan kapasitas penyimpanan agar mutu barang yang disimpan tetap sesuai standar sekaligus melakukan stok opname sesuai dengan usia simpan dan kondisi produk dalam rangka menjamin mutu dan keamanan pangan.
 - h. Untuk meminimalisir human eror pengelola gudang dan kemudahan mitra penyimpan ikan, system warehouse digital dapat segera diterapkan dan ditingkatkan dengan didukung dengan SDM yang handal dan berteknologi.
4. Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) adalah
- a. Pendampingan dan fasilitasi perluasan jaringan pemasaran dan penerapan mutu hasil perikanan mengingat potensi hasil kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Jawa Barat relatif tinggi;
 - b. Implementasi kerjasama optimalisasi pemanfaatan pemanfaatan asset bantuan pemerintah pada Direktorat Logistik;

- c. Dukungan pengembangan pasca panen di wilayah Jawa Barat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat disambungkan melalui program atau kegiatan untuk meningkatkan daya saing produk dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
5. Hasil dari pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebagai berikut :
- Melakukan monitoring pemantauan perkembangan implementasi kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap implementasi kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak;
 Perlunya melakukan koordinasi lebih lanjut dengan melibatkan stakeholder terkait dan lintas eselon I maupun eselon 2 lingkup KKP agar dapat menyusun rencana aksi bersama untuk optimalisasi pemanfaatan pemanfaatan asset bantuan pemerintah pada Direktorat Logistik menuju pemasaran luar negeri berdasarkan hasil masukan dan mempertimbangkan sumberdaya yang ada.

Dokumentasi *Focus Group Discussion* (FGD) Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan Hasil Perikanan



1.2.6. Sasaran Kegiatan Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan

7. Indikator Kinerja Kegiatan Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)

Definisi indikator ini adalah Pembinaan dan Penguatan pelaku usaha distribusi perikanan (Suplier/pengepul dan Pengolah/industri pengolahan) dan penyedia logistik dalam rangka distribusi hasil perikanan. Target indikator tahun 2023 adalah 18 (delapan belas) kesepakatan dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Dokumen kesepakatan kemitraan antar Pelaku usaha KP dalam rangka distribusi hasil perikanan

Σa :

Jumlah Dokumen kesepakatan kemitraan antar Pelaku usaha KP dalam rangka distribusi hasil perikanan

Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan sampai dengan Triwulan II tercapai 8 Kesepakatan.

Capaian sampai dengan TW II adalah sebesar 8 Kesepakatan atau 100% dari target. Adanya peningkatan capaian sebanyak 5 kesepakatan dari periode TW I. Hal ini disebabkan oleh kepatuhan dalam menetapkan jadwal kegiatan. Selain itu telah dilakukan kordinasi awal dengan pelaku usaha perikanan untuk dilakukan kesepakatan bersama dengan pelaku jasa logistik.

Tabel 16. Target dan capaian IK 7

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW2	TA 2023	Sd TW2	% thd target sd TW4
7	SK6. Terdistribusikannya hasil perikanan dan penyediaan layanan jasa logistik						
	IK7. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan	Kesepakatan	PA	8	18	8	44,44

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan Dalam rangka distribusi hasil perikanan dengan pagu awal sebesar Rp 900.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp270.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp77.666.273,- atau sebesar 8,63% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

7.1. Perkembangan Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT. Kereta Api Logistik

Dalam rangka meningkatkan akses transportasi dan distribusi hasil kelautan dan perikanan menggunakan moda kereta api, telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT. Kereta Api Logistik (KALOG). Berkaitan dengan hal tersebut kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penandatanganan PKS dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2022 oleh Sekretaris Jenderal KKP dan Direktur Utama PT. Kereta Api Logistik dengan judul PKS yaitu “Pengembangan Akses Transportasi dan Distribusi Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Moda Kereta Api”. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a) Pengembangan fasilitasi layanan multimoda distribusi hasil kelautan dan perikanan;
 - b) Pengembangan infrastruktur penunjang akses transportasi dan distribusi hasil kelautan dan perikanan;
 - c) Fasilitasi program kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan akses transportasi bagi usaha kelautan dan perikanan; dan
 - d) Peningkatan kapasitas operator logistik dalam distribusi hasil kelautan dan perikanan yang menerapkan sistem rantai dingin dengan moda kereta api.
2. Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani (12 Oktober 2022 – 12 Oktober 2027) dan Rencana Aksi telah disusun untuk tahun pertama yaitu periode Oktober 2022 – Oktober 2023.
3. Perkembangan Tindak Lanjut PKS dimaksud:
 - a) Telah dilakukan Sosialisasi fasilitas layanan transportasi dengan moda kereta api kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan serta stakeholder terkait pada bulan Februari 2023 di Surabaya dengan menghadirkan narasumber meliputi perwakilan PT. Kereta Api Indonesia (KAI), PT. Kereta Api Logistik (KALOG) dan Direktorat Logistik.
 - b) KALOG membangun Cold Storage di 6 stasiun di beberapa titik lokasi Pulau Jawa dengan kapasitas 5 ton yang akan digunakan sebagai gudang penyimpanan sementara, sebelum pengangkutan dengan kereta api untuk produk hasil kelautan dan perikanan, maupun produk yang membutuhkan penanganan dingin. Enam lokasi tersebut meliputi yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Banyuwangi.
 - c) Saat ini KALOG sedang membuat boks berpendingin yang akan digunakan untuk menyimpan produk yang membutuhkan suhu dingin/beku selama pengiriman di atas gerbong barang kereta api

- d) PT. KAI juga membuat gerbong barang berpendingin yang akan digunakan untuk pengangkutan produk yang membutuhkan suhu dingin/beku selama pengiriman.
 - e) Terdapat peningkatan rata-rata volume muatan kontainer berpendingin menggunakan moda kereta api dari 135 teus/20” (setara 1,6 ton) per bulan (sebelum penandatanganan PKS) menjadi 230 teus/20” (setara 2,7 ton) per bulan (setelah penandatanganan PKS).
4. Sebagai realisasi Rencana Aksi sebagaimana Perjanjian Kerja Sama maka pada tanggal 21 Juni 2023 akan diselenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Distribusi Hasil Kelautan dan Perikanan menggunakan Moda Kereta Api yang menghadirkan pelaku usaha perikanan sebagai peserta dengan narasumber yang berasal dari Ditjen PDSPKP, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Kereta Api Logistik, AP5I, dan perwakilan pelaku usaha perikanan 5.
 5. Kegiatan FGD Distribusi Hasil Kelautan dan Perikanan menggunakan Moda Kereta Api pada tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Kota Semarang yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Kabupaten Pati terkait rantai pasok ikan sebagai bahan baku industri dan pemenuhan konsumsi dalam negeri serta kegiatan pelepasan pengiriman produk perikanan menggunakan moda kereta api.

Dokumentasi Perkembangan Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT. Kereta Api Logistik



1.2.7. Sasaran Kegiatan Terbangun dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan

8. Indikator Kinerja Kegiatan Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)

Definisi indikator ini adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah atau non pemerintah. Bantuan yang diberikan dapat berupa sarana dan prasarana. Bantuan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan yaitu berupa gudang beku portable dilengkapi atau tidak dilengkapi ABF. Target indikator tahun 2023 adalah 19 (sembilan belas) unit dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$x = \sum a$$

X : Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan

$\sum a$: Jumlah gudang beku portable yang diadakan

Tabel 17. Target dan capaian IK 8

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW2	TA 2023	Sd TW2	% thd target sd TW 4
8	SK7. Terbangun dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan						
	IK8. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	Unit	PA	-	19	-	-

Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QEG Gudang Beku Portabel dengan pagu awal sebesar Rp 43.108.549.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 8.720.138.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp1.049.687.929,- atau sebesar 2,43% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

8.1. Rapat Pembahasan monitoring Cold Storage di Kab. Konawe Utara

Rapat dilaksanakan tanggal 7 Juni 2023 di Kantor KKP, dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan, dan dihadiri perwakilan Inspektorat IV KKP, perwakilan Kelompok Keuangan dan Umum Setditjen PDSPKP, perwakilan Kelompok Hukum, Kerjasama, dan Humas, Fungsional APHP Madya Direktorat Logistik, dan Pelaksana Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan. Hasil rapat sebagai berikut:

1. Tujuan rapat adalah Membahas Rencana Aksi/ Tindak Lanjut Penanganan Aset Cold Storage BP TA 2016 di Kabupaten Konawe Utara setelah sebelumnya dilakukan monev pemanfaatan tanggal 17 Mei 2023 dan diketahui bahwa seluruh mesin pendingin hilang.
2. Sebagai tindak lanjut hasil monev, Direktorat Logistik pernah bersurat kepada DKP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor B.1225/DJPDSPKP.2/PDS.130/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Perihal Permohonan Rencana Aksi.
3. CS dibangun tahun 2016 melalui dana TP kabupaten Konawe Utara. Hasil telah diserahkan melalui BAST No BA.8375/DJPDSPKP/PL.932/XII/2016 tanggal 30 Desember 2023. Dalam rangka penerapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, aset tersebut diserahkan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui BAST Nomor 030/4434 dan Nomor 028/6733 tanggal 30 Oktober 2023 sehingga secara tanggung jawab, berada di Provinsi.
4. Perlu disiapkan dokumen kronologis yang memuat informasi sejak *cold storage* dibangun sampai monitoring terakhir terhadap aset tersebut, apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak berwajib.
5. Saran Tindak Lanjut : Direktorat Logistik dapat menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Sesditjen PDSPKP. Terlampir kami sampaikan konsep memo kepada Sekretaris Ditjen PDSPKP.

Dokumentasi Rapat Pembahasan monitoring Cold Storage di Kab. Konawe Utara



8.2. Pembahasan Permohonan Alih Fungsi Ruang Gudang Beku Portabel (GBP) dan ABF Kabupaten Sumbawa

Menindaklanjuti Surat Ketua Poklamsar Layar Let Rezeki Nomor 001/LLR/IV/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Alih Fungsi Ruang GBP dan ABF, telah dilaksanakan rapat pembahasan dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan tanggal 9 Juni 2023, dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan, dan dihadiri perwakilan Inspektorat IV KKP, perwakilan Kelompok Keuangan dan Umum Setditjen PDSPKP, perwakilan Kelompok Hukum Kerja Sama dan Humas Setditjen PDSPKP, Fungsional APHP Madya Direktorat Logistik, dan Pelaksana Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan.
2. Tujuan rapat adalah membahas tindak lanjut terhadap usulan dari Poklamsar Layar Let Rezeki yaitu alih fungsi ruang GBP dan ABF.
3. Poklamsar Layar Let Rezeki adalah penerima bantuan Bantuan Pemerintah GBP kapasitas 10 Ton dengan ABF 1 Ton pada Tahun Anggaran 2023, dengan BAST No B.5658/DJPDSPKP.0/PL.740/XI/2022 tanggal 11 November 2022.
4. Hasil :
 - a. GBP telah diserahkan kepada pengelola sehingga kepemilikan aset milik pengelola, namun berdasarkan Kepmen KP nomor 91/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah GBP Tahun 2023, diatur tentang monitoring dan evaluasi pemanfaatan selama 3 tahun. Monitoring dan evaluasi tersebut terkait spesifikasi dan garansi alat yang telah diberikan dan pelaksanaannya akan dipantau selama waktu tersebut.
 - b. Apabila akan dilakukan penambahan atau pengembangan terhadap GBP Portable harus dengan persetujuan Ditjen PDSPKP c.q. Direktorat Logistik selaku pemberi bantuan. Penambahan tersebut tidak mengubah layout, spesifikasi dan peruntukan dari GBP.
 - c. Apabila dilakukan penambahan maka pengelola harus bisa menjamin mutu ikan tetap terjaga, GBP tetap beroperasi dan harus lebih bermanfaat.
 - d. Perubahan ini dapat berakibat pada hilangnya jaminan purna jual terhadap barang-barang yang berasal dari Bantuan Pemerintah.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
 - f. Poklamsar Layar Let Rezeki selaku pengelola GBP 10 Ton dan ABF 1 Ton untuk menyampaikan FS atau laporan data produksi dan laporan analisis kelayakan secara lengkap, untuk bisa menggambarkan kondisi operasional selama memanfaatkan CS Portable tersebut.

5. Tindak lanjut : Direktorat Logistik akan menyampaikan surat jawaban dari Poklhasar Layar Let Rezeki.

Dokumentasi Pembahasan Permohonan Alih Fungsi Ruang Gudang Beku Portabel (GBP) dan ABF Kabupaten Sumbawa

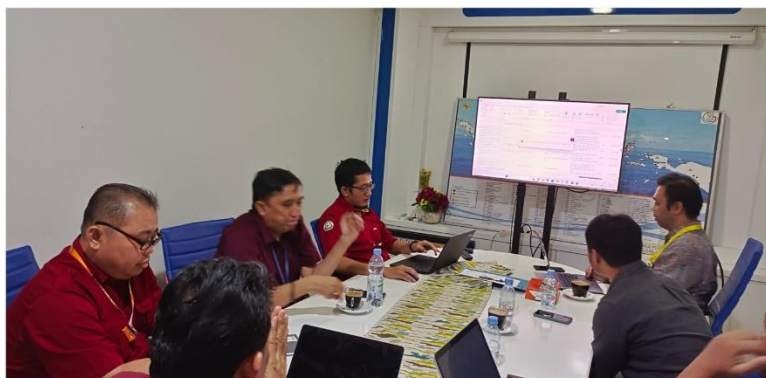


8.3. Penilaian Spesifikasi Teknis Produk Gudang Beku Portable Yang Ditawarkan Oleh Penyedia Di E-Katalog Sektoral KKP

Rapat penilaian spesifikasi teknis produk Gudang Beku Portable (GBP) yang ditawarkan oleh penyedia di e-Katalog Sektoral KKP kami laporkan sebagai berikut:

1. Penilaian dilaksanakan tanggal 8 Juni 2023 di kantor KKP oleh Tim Teknis Direktorat Logistik dibantu Tenaga Ahli dari Asosiasi Ahli Refrigerasi dan Tata Udara (A2RTU), ASHRAE, dan Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI).
2. Tujuan penilaian adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memilih calon penyedia yang memenuhi syarat.]
3. Hasil penilaian terhadap produk yang ditawarkan penyedia GBP yang tayang pada tanggal 8 Juni 2023 di etalase e-katalog sektoral KKP berdasarkan data online adalah :
 - a. Terdapat 5 penyedia GBP yang dapat dinilai sesuai kriteria yaitu PT Pura Agro Mandiri, PT DS Solutions International, PT Tamacool Sukses Perkasa, PT Mechtron Mastevi Indonesia, dan PT Cipta Arka Niaga.
 - b. Dihasilkan 2 penyedia yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis yaitu PT Pura Agro Mandiri dan PT DS Solutions, sedangkan 3 penyedia lainnya tidak memenuhi syarat.

Dokumentasi Penilaian Spesifikasi Teknis Produk Gudang Beku Portable Yang Ditawarkan Oleh Penyedia Di E-Katalog Sektor KKP



8.4. Rapat Klarifikasi Spesifikasi Teknis dan Penawaran Harga Produk Gudang Beku Portabel PT DS Solutions International

Rapat Klarifikasi Spesifikasi Teknis dan Penawaran Harga Produk Gudang Beku Portabel (GBP) dari PT DS Solutions International pada tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pembelian barang melalui e-Katalog Sektor dengan spesifikasi yang sama dapat dilakukan terhadap penyedia dengan penawaran harga terendah. Harga yang ditawarkan oleh PT DS Solutions per tanggal 20 Juni merupakan harga terendah dibandingkan penyedia lain yang memenuhi syarat umum.
2. Beberapa spesifikasi teknis yang diklarifikasi yaitu:
 - a. Ketersediaan kompresor ruang anteroom dengan merek Embraco di pasaran dalam kondisi sudah dirakit, sehingga ketika dipesan barang bisa langsung dikirim.
 - b. Kenaikan harga yang ditawarkan salah satunya disebabkan karena ukuran ruang penyimpanan 50% lebih besar daripada yang ditawarkan tahun 2022.
 - c. Lamanya waktu pembekuan di ruang ABF sesuai dengan pengumuman di e-Katalog yaitu 8-10 jam, sementara yang tertera di e-katalog lamanya waktu pembekuan 10 jam.
 - d. Lantai GBP menggunakan beton yang bersifat paten dimana sebagian dinding panel ditanam dalam lantai beton tersebut sehingga tingkat portability-nya rendah/ tidak ada. Konsep GBP dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan apabila di kemudian hari GBP tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola. Dengan konstruksi GBP yang ditawarkan PT. DS tentunya akan menyulitkan apabila GBP tersebut dipindahkan ke lokasi lain karena tidak dimanfaatkan atau alasan lainnya.
 - e. Produk evaporator dalam ruang ABF yang ditawarkan belum tercantum dalam brosur yang dilampirkan, hal ini dikarenakan produk tersebut custom dan didesain khusus sehingga belum masuk dalam brosur.
 - f. PT DS Solutions International belum melampirkan detail jadwal pelaksanaan pengadaan sejak kontrak sampai dengan Berita

- Acara Serah Terima (BAST), mengingat lama waktu pekerjaan yang ditawarkan sama dengan pengadaan tahun 2022 dimana semua pekerjaan mengalami keterlambatan
3. Masukan dari Inspektorat IV:
 - a. Proses Pengadaan GBP harus dilakukan secara efektif, efisien, dan taat pada aturan. PPK sudah tepat melibatkan Inspektorat dalam proses klarifikasi teknis dan penawaran harga
 - b. Harga yang ditawarkan tidak boleh melebihi pagu yang tersedia. PPK wajib memilih produk dengan harga terbaik dan menguntungkan negara
 - c. Dalam proses pembayaran nanti, PPK wajib melibatkan Inspektorat untuk melakukan *assurance*.
 - d. Keterlambatan pekerjaan tahun sebelumnya akan menjadi konsen pengawasan Inspektorat.
 4. Sehubungan dengan hasil klarifikasi teknis, PT DS Solutions diminta untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan spesifikasi teknis yang ditawarkan paling lambat tanggal 21 Juni 2023.

Dokumentasi Rapat Klarifikasi Spesifikasi Teknis dan Penawaran Harga Produk Gudang Beku Portabel PT DS Solutions International



8.5. Rapat Klarifikasi Spesifikasi Teknis dan Penawaran Harga Produk Gudang Beku Portabel PT Pura Agro Mandiri

Rapat Klarifikasi Spesifikasi Teknis dan Penawaran Harga Produk Gudang Beku Portabel (GBP) dari PT Pura Agro Mandiri, pada tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pembelian barang melalui e-Katalog Sektoral dengan spesifikasi yang sama dapat dilakukan terhadap penyedia dengan penawaran harga terendah. Harga yang ditawarkan oleh PT Pura Agro Mandiri per tanggal 26 Juni merupakan harga terendah dibandingkan penyedia lain yang memenuhi syarat umum.
2. Beberapa spesifikasi teknis yang diklarifikasi yaitu:
 - a. Merk kompresor yang ditawarkan untuk ruang ABF berbeda dari tahun sebelumnya yaitu semula Compressor Merk Copeland Emerson menjadi Bitser kapasitas Bitser dengan alasan:

- Bitser lebih dikenal dan umum digunakan dalam dunia pendingin di Indonesia
 - Memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia, sehingga apabila terdapat kerusakan klaim garansi dan ketersediaan sparepart lebih mudah
 - Bister yang digunakan berupa satu rangkaian *Condensing Unit* (CDU) sehingga performa lebih baik.
 - HP yang ditawarkan lebih besar, untuk memastikan bahwa akan tercapai suhu -35° dalam waktu 8-10 jam.
- b. Menawarkan *asset monitoring system* yang dapat memonitoring secara *real time* kondisi GBP baik dari segi operasional, lokasi, maupun suhu. Produk tersebut belum dimasukkan dalam struktur pembentuk harga, sebaiknya dapat ditampilkan sebagai salah satu komponen untuk negosiasi.
 - c. Selain beberapa hal di atas, kenaikan harga yang ditawarkan oleh PT Pura Agro Mandiri cukup signifikan dikarenakan adanya kenaikan harga material metal dan aluminium 20-50%.
 - d. Terdapat data referensi harga tidak wajar yang disampaikan di e-Katalog sehingga perlu dilakukan perbaikan.
 - e. Sehubungan dengan hasil klarifikasi teknis, PT Pura Agro Mandiri diminta untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan spesifikasi teknis yang ditawarkan paling lambat tanggal 27 Juni 2023.

Dokumentasi Rapat Klarifikasi Spesifikasi Teknis dan Penawaran Harga Produk Gudang Beku Portabel PT Pura Agro Mandiri



8.6. Rapat Rencana revisi Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP) TA 2023

Rapat Rencana revisi Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP) TA 2023 pada tanggal 21 Juni 2023, Rapat dipimpin Subkoordinator Pengadaan dan dihadiri oleh Tim Teknis dari Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Keuangan dan Umum Setditjen PDSPKP, Fungsional APHP Madya, perwakilan Tata Usaha Direktorat Logistik, serta Pelaksana Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan. Tujuan rapat tersebut menghasilkan draft usulan

revisi Petunjuk Teknis Kepmen No 91/SJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel TA 2023.

Tindak lanjut menyampaikan draft usulan revisi Petunjuk Teknis Kepmen No 91/SJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel TA 2023 dari Direktur Logistik kepada Setditjen PDSPKP untuk proses lebih lanjut.

Dokumentasi Rapat Rencana revisi Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel (GBP) TA 2023



1.2.8. Sasaran Kegiatan Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan

9. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2023 adalah 26 (dua puluh enam) unit dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X : Pengadaan sarana distribusi yang disediakan

Σa : Jumlah mobil refrigerasi yang disediakan

Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir.

Tabel 18. Target dan capaian IK 9

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW2	TA 2023	Sd TW2	% thd target sd TW 4
9	SK6. Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan						
	IK9. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	Unit	PA	-	26	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 3 (tiga) Rincian Output (RO) yaitu QEG Mobil Refrigerasi, Mobil Refrigerasi (MP Korporasi) dan Mobil Refrigerasi mendukung revitalisasi tambak dengan pagu awal sebesar Rp22.652.937.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 6.256.950.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp949.012.785,- atau sebesar 4,18% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

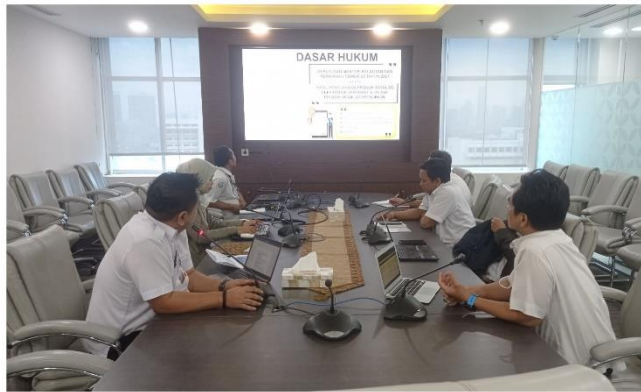
9.1. Persiapan Pengadaan Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 melalui Katalog Sektoral KKP

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023, beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat dipimpin oleh Sub Koordinator Penataan Distribusi, dan dihadiri oleh Perwakilan Inspektorat IV KKP, Biro Umum dan PBJ Setjen KKP, Vidi Januardi, Ahmad Zuhdi, Analis Pasar Hasil Perikanan Muda, Pelaksana Kelompok Distribusi Direktorat Logistik.
- 2) Tujuan dilaksanakan Persiapan Pengadaan Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 melalui Katalog Sektoral KKP, adalah:
 - a. Penayangan produk Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 pada Katalog Sektoral KKP;
 - b. Usulan Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 85/SJ Tahun 2021 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Mobil Berpendingin
- 3) Pada Tahun 2023 Pengadaan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi terbagi menjadi 3 rincian output, yaitu:
 - a. Pengadaan kendaraan berefrigrasi sebanyak 13 unit yang terdiri dari:
 - 8 unit dalam mendukung PIT, MLIN, Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan;

- 5 unit dalam mendukung Kampung Nelayan Maju (KALAJU)
 - b. Pengadaan kendaraan berefrigrasi dalam mendukung Korporasi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya sebanyak 2 unit
 - c. Pengadaan kendaraan berefrigrasi dalam mendukung Revitalisasi Tambak Budidaya sebanyak 3 unit.
- 4) Perubahan spesifikasi pada katalog sektoral KKP dengan merevisi Kepmen KP No. 85 Tahun 2021 dikarenakan telah kel Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
 - 5) Proses negosiasi untuk pengurusan surat kendaraan mengenai mekanisme penyedia melakukan *upload* harga kendaraan berefrigrasi untuk plat hitam/putih dan TKDN kendaraan berefrigrasi.

Dokumentasi Persiapan Pengadaan Kendaraan Berefrigrasi Tahun



10. Sosialisasi Juknis Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 April 2023, beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dipimpin oleh Koordinator Kelompok Distribusi dan dihadiri oleh Perwakilan dari Inspektorat IV, Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, drh. H. Slamet, M.Si Praktisi Ahli, Perwakilan dari Kelompok Pemetaan dan Pemantauan, Direktorat Logistik, Koordinator Kelompok Distribusi Direktorat Logistik, Subkoordinator Kelompok Jasa Logistik, Subkoordinator Kelompok Penataan Distribusi Direktorat Logistik, Perwakilan Subkoordinator Kelompok Tata Usaha, Pelaksana Kelompok Distribusi, Direktorat Logistik.
- 2) Tujuan dilaksanakan Sosialisasi Juknis Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah, adalah untuk menjadi dasar dalam penentuan penerima kendaraan berpendingin Tahun 2023.
- 3) Jenis Pengusulan Bantuan Pemerintah Kendaraan Berefrigrasi
 - Pengusulan Secara Langsung
 - a. Pelaku Usaha mengusulkan Bantuan Kendaraan Berpendingin kepada Dirjen PDSPKP c.q Dir. Logistik

- b. Direktorat Logistik berkoordinasi dengan Dinas KP Kab/Kota/Prov utk identifikasi, verifikasi Pelaku Usaha yang mengusulkan Bantuan Kendaraan Berpendingin
- Pengusulan Melalui Dinas
 - a. Pelaku Usaha mengusulkan Bantuan Kendaraan Berpendingin kepada Dinas Kab/Kota dan Provinsi secara berjenjang
 - b. Dinas KP Prov mengusulkan Pelaku Usaha yang mengusulkan Bantuan Kendaraan Berpendingin kepada Dirjen PDSPKP c.q Dir. Logistik.

11. Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Tahun 2017

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin, Direktorat Logistik melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan pada seluruh penerima bantuan di beberapa Provinsi diantaranya adalah:

- 1) Provinsi Jawa Barat;
- 2) Provinsi Sumatera Barat; dan
- 3) Provinsi Jawa Timur

Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

1) Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat meliputi:

- Dalam Rangka Pengecekan Fisik Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2017 dan Penandatanganan Berita Acara Penarikan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2017 di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
- ✓ Menindaklanjuti Hasil Rapat Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin tahun 2017 lingkup Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Maret 2023, Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP melaksanakan Pengecekan Fisik Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2017 dan Penandatanganan Berita Acara Penarikan Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2017 di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.
 - ✓ Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran serta dihadiri oleh Perwakilan Inspektorat IV KKP, Koordinator Kelompok Distribusi Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP, Subkoordinator Kelompok Penataan Distribusi Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP, Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin Tahun 2017 di Kabupaten Pangandaran, yaitu:
 - KUD Mina Pari Parigi;

- KSU Mina Bahari; dan
 - KUD Mina Rasa.
- ✓ Beberapa hal yang dapat dilaporkan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran mewakili Penerima bantuan menyampaikan kepada Bapak Dirjen PDSPKP c.q Direktur Logistik untuk penanguhan penarikan 2 (dua) unit kendaraan an KUD Mina Rasa dan KUD Mina Bahari selama 6 (enam) bulan.
 - b) KUD Mina Rasa dan KUD Mina Bahari berkomitmen untuk:
 - Melakukan perluasan akses pasar dalam mendistribusikan hasil perikanan ke Cilacap, Pemalang, Pacitan dan Garut dengan target muatan 5-6 ton per trip per minggu.
 - Akan melakukan kerja sama distribusi dengan pelaku usaha lain untuk pemenuhan pasokan ikan untuk kebutuhan lokal dan bahan baku industri di Kabupaten Pangandaran.
 - Menyampaikan laporan bulanan pemanfaatan kendaraan berpendingin yang dilengkapi dengan bukti dan data dukung yang valid.
 - Apabila selama 6 (enam) bulan ke depan dinilai belum memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan, maka pihak koperasi bersedia untuk mengikuti ketentuan pemanfaatan bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin yang berlaku.
 - c) Khusus untuk KUD Mina Pari Parigi tetap dilakukan penarikan kendaraan (1 unit kendaraan roda 6) karena yang bersangkutan diketahui tidak memanfaatkan kendaraan sesuai dengan peruntukannya yaitu mengangkut selain ikan.
 - d) Selanjutnya kendaraan tersebut akan dibawa ke Kota Cirebon untuk dilakukan pengalihan kepada calon penerima baru.

Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Tahun 2017



2) Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Kendaraan Berpendingin di Provinsi Sumatera Barat.

- a. Rapat Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin di Provinsi Sumatera Barat dilakukan di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan dihadiri oleh:
 - ✓ Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
 - ✓ Perwakilan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang;
 - ✓ Perwakilan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - ✓ Bendahara KUB Gurita Kota Padang (Penerima BP Roda 6 TA 2017);
 - ✓ Bendahara Poklhasar Bali Kota Padang (Penerima BP Roda 4 TA 2018);
 - ✓ Sekretaris Koperasi Berlian Samudera Kabupaten Pesisir Selatan (Penerima BP Roda 4 TA 2017); dan
 - ✓ Penyuluh Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Hasil rapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin serta kunjungan lapangan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Koperasi Berlian Samudera Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan sudah tidak sanggup mengoperasikan BP Kendaraan Berpendingin yang diterima karena produksi hasil tangkap cenderung menurun serta meminta untuk dilakukan proses penarikan/pengalihan.
 - ✓ Secara kelembagaan Poklhasar Bali Kota Padang sudah tidak aktif/bubar sejak tahun 2020 dan saat ini 1 (satu) unit BP Kendaraan Berpendingin (roda 4) hanya dikuasai oleh 1 orang (ex bendahara Poklhasar Bali). Poklhasar Bali Kota Padang siap dalam kurun waktu 3 bulan berkomitmen untuk melakukan peningkatan volume pengangkutan dengan melakukan berbagai upaya untuk memperluas akses pasar dan bekerja sama dengan pelaku usaha di bidang perikanan yang disahkan dengan Surat Pernyataan yang dilakukan oleh Bendahara Poklhasar Bali dengan Tim Teknis Pusat dan diketahui oleh Perwakilan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dan Penyuluh Perikanan Kota Padang.
 - ✓ KUB Gurita Kota Padang, akan dilakukan penarikan karena melanggar ketentuan poin nomor 3 BAST Nomor:45/PDS.1/PL.933/XII/2017 yaitu tidak menyampaikan laporan pemanfaatan serta berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi Tim Teknis Pusat di lapangan ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- Kepengurusan KUB Gurita Kota Padang sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2020 dan saat ini bantuan BP Kendaraan Berpendingin hanya dikuasai oleh 1 orang.
 - Laporan pemanfaatan yang dilaporkan (2021-2022) dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya karena tidak didukung dengan data dukung yang memadai.
 - KUB Gurita Kota Padang tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak menghadiri rangkaian monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Pusat bersama dengan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang tanggal 23-25 Mei 2023.
- ✓ Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q Direktorat Logistik (Tim Teknis Pusat) telah melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan berpendingin roda 4 (empat) dari Koperasi Berlian Samudera Kabupaten Pesisir Selatan.
- ✓ Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan pemerintah sarana kendaraan berpendingin dimaksud, Tim Teknis Pusat telah melakukan Penilaian terhadap calon penerima pengalihan bantuan kendaraan berpendingin dengan hasil sebagai berikut:
- Pelaksanaan penilaian dan penghitungan analisa usaha dilakukan oleh Tim Teknis Pusat didasarkan pada petunjuk teknis serta pedoman penilaian (scoring) kendaraan berpendingin. Adapun kriteria yang menjadi aspek penilaian meliputi aspek legalitas, kelembagaan, dan administrasi. Sedangkan penilaian pada analisa usaha meliputi analisa Net Present Value (NPV), Nilai B/C Ratio dan Payback Period (PP).
 - Sebanyak 2 calon penerima pengalihan bantuan kendaraan berpendingin TA. 2017 di Provinsi Sumatera Barat yang dinilai adalah:
 - Poklamsar Cemara Laut, Kabupaten Pesisir Selatan dengan bidang usaha penangkapan dan pemasaran hasil perikanan dinyatakan layak.
 - Koperasi Perikanan Suci Samudera, Kabupaten Pesisir Selatan dengan bidang usaha penangkapan dan pemasaran hasil perikanan dinyatakan layak.

Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Kendaraan Berpendingin di Provinsi Sumatera Barat



3) Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Kendaraan Berpendingin di Provinsi Jawa Timur.

- a. Rapat dipimpin oleh Koordinator Kelompok Distribusi dan dihadiri oleh Perwakilan Inspektur IV, Itjen KKP, Sesditjen PDSPKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Situbondo, Dinas Perikanan Ponorogo, Dinas Perikanan Pamekasan, Dinas Perikanan Sumenep, Ketua Koperasi La Tansa Pondok Modern Gontor, Ketua Koperasi Nelayan Pandean Wonorejo, Ketua Yayasan Al-Ikhlas Pesisir Ketah, Ketua Poklamsar Putra Mina Laut, Ketua Koperasi Sari Laut, Ketua Koperasi Super Mantap Sejahtera.
- b. Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Paparan pemanfaatan disampaikan oleh Perwakilan Dinas Kabupaten dan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan masing-masing penerima.
 - ✓ Koperasi Sari Laut Kabupaten Pamekasan menyatakan sudah tidak sanggup mengoperasikan Bantuan Pemerintah kendaraan yang diterima karena produksi hasil tangkapan cenderung menurun serta meminta untuk dilakukan penarikan/pengalihan.
 - ✓ Koperasi La Tansa Pondok Modern Gontor, Koperasi Nelayan Pandean Wonorejo, Yayasan Al-Ikhlas Pesisir Ketah, Poklamsar Putra Mina Laut dan Koperasi Super Mantap Sejahtera siap dalam kurun waktu 3 bulan ini berkomitmen untuk melakukan peningkatan pengangkutan dengan melakukan berbagai upaya dengan memperluas akses pasar dan bekerja sama dengan pelaku usaha di bidang perikanan lainnya yang disahkan dengan Komitmen Bersama yang dilakukan oleh ketua koperasi dengan Korkel Distribusi dan diketahui oleh Perwakilan Inspektur IV, Perwakilan Dinas KP Kabupaten dan Perwakilan Dinas KP Provinsi.

Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Kendaraan Berpendingin di Provinsi Jawa Timur



1.2.9. Sasaran Kegiatan Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang

12. Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Badan usaha yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan komoditas perikanan dan kelautan yang difasilitasi sebagai kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang. Target indikator tahun 2023 adalah 8 (delapan) Lembaga dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X : Lembaga Pengelola Gudang yang di fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang

Σa : Jumlah Lembaga Pengelola Gudang yang di fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang

Tabel 19. Target dan capaian IK 10

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWII	TA 2023	Sd TWII	% thd target sd TW 4
10	SK9. Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang						
	IK10. Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	Lembaga	PA	4	8	4	50

Lembaga pengelola gudang beku yang di fasilitas penerapan sistem resi gudang merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Adanya pengurangan dari target tahun

2022 sebanyak 2 lembaga atau 20% karena pagu anggaran tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar Rp 200.000.000,- atau sebesar 20% dari tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Capaian sampai dengan TW II Tahun 2023 adalah sebanyak 4 lembaga atau 100% terhadap target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 periode yang sama, capaian pada Tahun 2023 mengalami penurunan 50%. Hal ini disebabkan karena adanya anggaran *Automatic adjustment* (AA) yang membuat perencanaan penarikan dana berbeda dengan tahun 2022.

Untuk mendukung pelaksanaan sistem resi gudang perikanan perlu dilakukan penyiapan kelembagaan mulai dari kelembagaan pemilik ikan, pengelola gudang, lembaga penilaian kesesuaian untuk uji mutu ikan, lembaga pembiayaan, asuransi yang didukung oleh pusat registrasi serta pembinaan baik dari Kementerian Perdagangan selaku Instansi Pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan resi gudang dan Kementerian Kelautan Perikanan sebagai pembina pelaku usaha perikanan. Oleh sebab itu pengembangan sistem resi gudang komoditas ikan perlu penyiapan kelembagaan sebagai perangkat pelaksanaan.

Pendampingan dilakukan pasca sosialisasi dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha dalam perizinan kelembagaan Sistem Resi Gudang. Pelaku yang didampingi merupakan pelaku dari peserta sosialisasi yang tertarik lebih lanjut terkait implementasi Sistem Resi Gudang.

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang dengan pagu awal sebesar Rp 800.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 240.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp341.313.336,- atau sebesar 42,66% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

12.1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Komoditas Perikanan di Lokasi Produksi, Pengumpulan dan Distribusi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Komoditas Perikanan di Lokasi Produksi, Pengumpulan dan Distribusi di Mayangan – Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sehubungan dengan kunjungan ke Pengelola Gudang SRG PT. Cipta Usaha Agro Niaga (PT. CUAN) dan CV. Pesona Mandiri yang berlokasi di Mayangan-Probolinggo pada tanggal 13 April 2023 sebagai berikut.

- a. PT. Cipta Usaha Agro Niaga (PT. CUAN)

1. Gudang yang digunakan oleh PT. CUAN merupakan Sewa dari CV. Beejay Seafood yang juga merupakan Unit Pengolahan Ikan Karang dan Demersal tujuan ke Ekspor. Negara yg menjadi tujuan ekspor antara lain Australia dan Malaysia dengan rata-rata pengiriman 5 - 15 kontainer per bulan dan produk yang diekspor berupa fillet beku.
2. PT. CUAN telah menerbitkan SRG untuk komoditas ikan sejak tahun 2021, dan sebelumnya telah mengelola komoditas SRG yang lain seperti gabah, beras, dan jagung. PT. CUAN juga bekerja sama dengan CV. Beejay Seafood untuk menjadi stand-by buyer dan menjadi LPK Uji mutu sekaligus menjaga mutu barang.
3. Ikan yang di SRG kan merupakan milik pengumpul yang menunda penjualan ikannya dengan disimpan di Cold Storage dengan menjadikan ikan yang disimpan sebagai agunan pembiayaan.
4. Di tengah harga bahan baku ikan yang terus naik, CV. Beejay Seafood selaku pemilik Gudang juga cukup terbantu dengan adanya SRG karena dapat mendapatkan alternatif pemasukan dengan cara mengoptimalkan ruang kosong di Gudang yang berkapasitas 800 ton dengan charge simpan sekitar Rp22-Rp23/kg/hari.
5. Jenis ikan yang di SRG-kan antara lain ikan kembung, ikan lele, ikan wahu dan ikan gerot. Rata-rata lama simpan untuk ikan wahu dan gerot sekitar satu bulan lebih. Namun untuk kembung saat ini telah disimpan sebagai komoditas SRG sejak bulan Desember 2022 - April 2023 sebanyak kurang lebih 200 ton. Dari informasi yang diperoleh, pemilik ikan belum berani menjual ikannya karena saat ini sedang banyak ikan kembung impor di Jabodetabek yang dijual lebih murah dengan harga sekitar Rp.30.000/kg dibandingkan dengan harga ikan kembung lokal yaitu Rp. 37.000/kg.
6. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Logistik menginformasikan bahwa saat ini di Pemda DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Dharma Jaya sedang membutuhkan Ikan Kembung untuk program pangan bersubsidi, yang seharusnya tidak dapat dipasok dari ikan kembung impor, karena ketentuan peruntukkan impor tidak untuk dijual ke pasar tradisional. Ikan kembung yang di SRG-kan berpotensi untuk dikerja samakan dalam program pangan murah DKI Jakarta.

b. CV. Pesona Mandiri

1. CV. Pesona Mandiri merupakan pengelola gudang SRG dengan gudang yang disewa dari PT. PELINDO dengan kapasitas 1.000 ton.
2. Pada saat kunjungan pada tanggal 13 April 2023 untuk pelaksanaan SRG tahun 2023, didapatkan informasi bahwa sampai saat ini belum ada penerbitan resi dan saat ini masih terdapat stok ikan SRG untuk resi yang terbit pada bulan Desember 2022 dengan jenis ikan layang sebanyak 40 ton.
3. CV. Pesona Mandiri telah mengajukan rencana kebutuhan impor

- untuk tahun 2023 dan telah disetujui sebanyak 250 ton melalui Persetujuan Impor (PI) yang telah diterbitkan pada bulan Maret 2023.
4. Saat ini belum ada impor yang direalisasikan karena harga ikan pada negara tujuan dianggap belum cocok dengan harga yang ditargetkan oleh CV. Pesona Mandiri.
 5. CV. Pesona Mandiri menyanggupi untuk merealisasikan impor yang telah ditetapkan hingga akhir tahun.
 6. Direktorat Logistik menginformasikan ke CV. Pesona Mandiri agar memperhatikan pendistribusian ikan benar-benar sampai ke end user yang benar.
 7. CV. Pesona Mandiri juga diingatkan untuk aktif melaporkan realisasi ke aplikasi STELINA setiap sebulan sekali. Jika belum ada realisasi pada tiap akhir bulan, CV. Pesona Mandiri dapat menginput jumlah nihil. Apabila sudah terdapat realisasi, CV. Pesona Mandiri diharapkan dapat menginput jumlah realisasi beserta ke mana saja pendistribusiannya.

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Komoditas Perikanan di Lokasi Produksi, Pengumpulan dan Distribusi



12.2. Kegiatan Sosialisasi dan Inisiasi Kelembagaan Sistem Resi Gudang Komoditas Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dilaksanakan pada tanggal 21-23 Juni 2023 di Ruang rapat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan zoom meeting dimulai dari pukul 09.00-12.30 WITA, Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (Bapak Muslim, ST.,M.Si), dihadiri oleh Bappebti, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Balai KIPM Mataram, Dinas Perikanan Kabupaten se NTB, BRI NTB, Pelaku Usaha Rumput Laut dan Ikan di Pulau Lombok dan Pulau Bima dan Tenaga Pendamping Usaha (TPU) di Lombok.

Dalam rangkaian pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Inisiasi Kelembagaan Sistem Resi Gudang Komoditas Rumput Laut di Provinsi NTB- Kota Mataram Tim Direktorat Logistik yang dipimpin Koordinator Tata Niaga telah melakukan kunjungan ke berbagai instansi diantaranya :

- 6.1.1.1. Balai KIPM Mataram, disana Tim Direktorat Logistik memperoleh banyak Informasi dari Bpk.OBING HOBIR AS`ARI, S.Pi., M.P (Kepala Balai

KIPM) dan Tim terkait Tata Niaga ikan, garam, rumput laut dan mutiara yang selama ini berlangsung di NTB. Diperoleh informasi diperlukan pelatihan terkait jenis dan kualitas Mutiara di Provinsi NTB.

Autore Pearl Farm and Showroom di Lombok Utara, Tim Logistik memperoleh informasi dari Mr. Francesco Bruno (Presiden Direktur) dan Tim terkait proses budidaya, Tata Niaga, ekspor dan impor terkait Inti Mutiara/Nukleus dan Mutiara.

Perwakilan Satker BBP2KP Mataram, Tim Logistik melakukan sharing dan diskusi peran dan dukungan Perwakilan Balai BBP2KP terhadap pelaksanaan kegiatan Dit. Logistik di Wilayah NTB.

Sebagai provinsi yang mempunyai ekosistem perairan komplit, mulai dari ekosistem perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, menjadikan seluruh potensi perikanan budidaya sangat layak untuk dikembangkan di NTB. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan produksi rumput laut terbesar kelima di Indonesia. Budidaya rumput laut jenis Cottoni telah melibatkan 19 kelompok dengan total 342 orang dengan kepemilikan lahan dan sistem budidaya. Baik itu *longline* dan patok dasar mampu menghasilkan produksi sebanyak 646.500 kg rumput laut basah per tahun dalam siklus selama 45 hari, dengan total mencapai 387 ton per tahun. Sedangkan untuk budidaya rumput laut jenis Spinosum melibatkan 6 kelompok dengan total sebanyak 120 orang petani dengan sistem budidaya patok dasar atau rakit apung yang mampu memproduksi sebanyak 180.000 kilogram dalam siklus selama 30 hari. Artinya, total produksi yang dihasilkan pertahunnya mencapai 126 ton pertahun dengan harga per kilogram mencapai 7.000 rupiah.

Penerapan Sistem Resi Gudang Ikan, akan memberikan manfaat positif bagi konsumen berupa jaminan ketersediaan ikan dan jaminan mutu ikan yang bagus dengan harga yang stabil. Selain itu dengan mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang, maka penyerapan produksi yang belum terserap pasar dapat terealisasi dengan harga yang wajar sehingga dapat menjadi solusi bagi nelayan dan pembudidaya ikan dalam meningkatkan ekonominya, kemudian dapat menjadi jaminan dalam akses permodalan yang didukung pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok pembudidaya dan nelayan, penyediaan pergudangan, kelembagaan dan permodalan sarana dan prasarana. Namun dalam menyukseskan Pengembangan Sistem Resi Gudang, maka koordinasi yang efektif harus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah dimana Sistem Resi Gudang akan dilaksanakan.

PT Razindo Global Nusantara (Razindo) biasanya menyimpan barang sekitar 7-30 hari saja, karena begitu ada permintaan dari pembeli (*buyer*), barang langsung dikirim oleh karena itu saat ini perusahaan belum mempertimbangkan SRG sebagai suatu opsi. Kendala yang dihadapi PT Razindo antara lain: kualitas barang yang diinginkan sering kali belum

memenuhi standar, sehingga perusahaan agak sulit menghimpun barang. Terlebih perusahaan juga memiliki keterbatasan modal, sehingga apabila harga sedang tinggi, sering kali perusahaan mengurungkan niat membeli. Hingga saat ini rata-rata penjualan ekspor rumput laut kering sekitar 50 ton dalam 1 bulan. Produk yang diperjualbelikan PT Razindo adalah jenis sargassum, dengan fluktuasi harga tidak terlalu tinggi. Perusahaan ini memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas relatif besar, namun belum banyak produk yang disimpan,

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Inisiasi Kelembagaan Sistem Resi Gudang Komoditas Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat



1.2.10. Sasaran Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

13. Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Inisiasi Kerjasama antar pelaku Usaha Perikanan dengan pelaku usaha Kapal Angkut Perikanan dalam mendukung Pengangkutan dan Pendistribusian Hasil Perikanan. Target indikator tahun 2023 adalah 3 (tiga) Lembaga dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X : Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

Σa : Jumlah Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Adanya persamaan target tahun 2022 dengan 2023 yaitu 3 lembaga. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam

dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan I, dimana sesuai dengan matrik rencana aksi. Target 1 lembaga pada triwulan III dan 2 lembaga pada triwulan IV.

Tabel 20. Target dan capaian IK 11

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWII	TA 2023	Sd TWII	% thd target TW 4
11	SK10. Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan						
	IK11. Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	Lembaga	PA	-	3	1	33,33

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BDB Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan dengan pagu awal sebesar Rp 1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp234.990.812,- atau sebesar 23,5% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

11.1. Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Pengelolaan Kapal Pengangkut Ikan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023, beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- 1) Dipimpin oleh Koordinator Kelompok Distribusi dan dihadiri oleh Kepala PPP Mayangan, Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, Pimpinan dan Pelaku Usaha Pengelola Kapal Pengangkut Ikan di Mayangan. Tujuan rapat adalah fasilitasi pengelolaan kapal angkut ikan.

- 2) Berdasarkan hasil diskusi dengan pelaku usaha Kapal Pengangkut Ikan diketahui beberapa isu strategis Pengelolaan Kapal Angkut yang diantaranya adalah:
 - a. Penentuan Pelabuhan Pangkalan untuk kapal pengangkut ikan
 - b. Kegiatan alih Muatan Kapal pengangkut ikan
 - c. Volume Pengangkutan dan Akses Pasar dalam mendistribusikan hasil perikanan
 - d. Tingginya Biaya Operasional akibat dibatasinya alih muatan kapal sehingga mengakibatkan biaya pengangkutan menjadi mahal
 - e. Kapasitas SDM dan ABK yang harus mengutamakan dari daerah pelabuhan pangkalan pada Zona PIT
 - f. Para pelaku usaha kapal pengangkutan ikan melalui Kepala PPP Mayangan akan mengusulkan beberapa saran dan masukan terkait dengan penyempurnaan aturan turunan dari PP 11 Tahun 2023 terkait dengan Pengelolaan Kapal Pengangkut Ikan.
- 3) Pada saat bersamaan telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara CV. Pesona Mandiri dengan PT. Honglong Sejahtera dalam rangka distribusi hasil perikanan dalam rangka mendukung logistik ikan.
- 4) Selanjutnya dilaksanakan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di Kabupaten Probolinggo dengan hasil sebagai berikut:
 - a. PPP Mayangan merupakan salah satu pelabuhan pangkalan kapal pengangkut ikan yang berada di wilayah Jawa Timur dengan luas kawasan 20 ha dan luas kolam labuh 5 ha.
 - b. Berdasarkan data dari Ditjen Perikanan Tangkap pada Aplikasi SILAT (perkembangan SIKPI Kapal diatas 30 GT aktif) per tanggal 23 Mei 2023, diketahui terdapat 23 kapal pengangkut ikan aktif di atas 30 GT yang memiliki pelabuhan pangkalan di PPP Mayangan.
 - c. Komoditas yang diangkut oleh kapal pengangkut ikan di PPP Mayangan yaitu ikan dasar (kakap merah, bawal, kerapu, manyung, dll)
 - d. Alur distribusi ikan dari PPP Mayangan didistribusikan ke pasar domestik (Surabaya, Jakarta, dan Semarang) dan ekspor (Cina, Vietnam, Malaysia, Singapura).

Dokumentasi *Focus Group Discussion (FGD)* Fasilitasi Pengelolaan Kapal Pengangkut Ikan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur



1.2.11. Sasaran Kegiatan Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen

12. Indikator Kinerja Kegiatan Layananan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)

Definisi indikator ini adalah Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya untuk mendapatkan legalitas perijinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) Layanan dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

L = Layanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP, dengan kegiatan antara lain :

- Perijinan usaha Pasca panen yang diterbitkan
- Sosialisasi Perijinan yang dilaksanakan
- Survei Kepuasan masyarakat

Layananan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan II, karena merupakan Layanan publik yang akan dilaporkan dalam 1 tahun pada triwulan IV.

Tabel 21. Target dan capaian IK 12

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWII	TA 2023	Sd TWII	% thd target TW 4
12	SK11. Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen						
	IK12. Layananan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	Layanan	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BAH Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen dengan pagu awal sebesar Rp 500.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 150.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp133.967.984,- atau sebesar 26,79% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

12.1. Refreshment Pelayanan Prima Penerbitan Ijin Usaha Pasca Panen Tahun 2023.

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas pelayanan publik untuk mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi sebagai upaya mewujudkan pelayan publik yang cepat, tepat, dan handal, serta menumbuhkan rasa memiliki dan peduli pada layanan perijinan jasa pasca panen penangkapan ikan, Direktorat Logistik menyelenggarakan *Refreshment* Pelayanan Prima Penerbitan Ijin Usaha Pasca Panen Tahun 2023. Beberapa hal yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Logistik dan penyampaian materi motivasi oleh Tono Prihatono. Kegiatan refreshment dihadiri oleh, Motivator, Koordinator Kelompok Lingkup Direktorat Logistik, Pejabat Fungsional Lingkup Direktorat Logistik, Subkoordinator Kelompok Lingkup Direktorat Logistik, Petugas PTSP Lingkup Direktorat Logistik, dan Pelaksana Lingkup Direktorat Logistik.
- 2) Meteri dan Narasumber dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Internalisasi dan Dukungan Direktorat Logistik pada PIT dan Kampung Budidaya Ekonomi Biru Sektor Kelautan dan Perikanan, Narasumber: Direktur Logistik.
 - b. Refreshment Pelayanan Prima Penerbitan Ijin Usaha Pasca Panen, Motivator: Tono Prihatono.
 - c. Perizinan Berusaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan, Narasumber: Kordinator Kelompok Distribusi.

- 3) Internalisasi dan dukungan Direktorat Logistik pada Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Kampung Budidaya Ekonomi Biru sektor kelautan dan perikanan yang sesuai dengan arahan Dirjen PDSPKP meliputi:
 - a. Kluster dukungan daya saing untuk PIT berbasis kuota dan kampung nelayan maju (Kalaju).

Berdasarkan PIT berbasis kuota dan Kalaju terdapat Piloting PIT Zona 3 tahun 2023, Penerapan tata kelola NK pada PIT untukutamakan produk lokal dan menjaga stabilitas harga ikan, serta Implementasi Stelina di PIT Zona 3.
 - b. Kluster penguatan regulasi
Melaksanakan tugas dan fungsi direktorat logistik berdasarkan regulasi yang berlaku dan ter-update yang dapat diimplementasikan sebagai berikut: Penguatan definisi, bisnis proses dan tata kelola, Seleksi regulasi tentang logistik yang spesifik, serta Afirmasi terhadap jenis komoditas, Kawasan, tingkat sosial-ekonomi, konektivitas.
 - c. Kluster penguatan data (data deskriptif menjadi analisa)
Dalam menampilkan sebuah data tidak hanya dalam bentuk tabel atau flowchart, namun data dapat disajikan dengan beberapa analisa sebagai berikut: melalui analisa data (sirkulasi lalu lintas ikan secara berkala (mingguan), melakukan sinkronisasi data (realisasi Neraca Komoditas dengan data lalu lintas BKIPM), mapping data logistik dan asset logistik (BP dan BMN), analisa karakter musim panen ikan sehingga dapat diprediksikan kapan UPI produksi dan usulan importasi, dan sinkronisasi data SRG dengan data SKP seperti Penguatan Neraca Komoditas dengan data recognition, verifikasi dan penetapan persyaratan.
 - d. Kluster dukungan daya saing untuk kampung budidaya
Berdasarkan Kampung Budidaya terdapat dukungan daya saing seperti Hilirisasi komoditas udang Bantuan Pemerintah pada Korporasi Budidaya, dan Bantuan Pemerintah pada Revitalisasi tambak.
 - e. Kluster pemanfaatan aset logistik atau sistem rantai dingin
Pemanfaatan Aset Logistik atau SRD dapat dilakukan dengan Monitoring dan evaluasi aset logistik/SRD secara berkala dalam rangka perumusan kebijakan dimasa mendatang.
 - f. Kluster transformasi Ditjen PDSPKP
PDS sedang melakukan transformasi melalui Re-design Sistem Logistik Ikan, Operasionalisasi STELINA, dan Penyusunan rasio anggaran dalam perencanaan kegiatan agar sesuai dengan grand desain logistik.
- 4) Penerbitan Ijin Usaha Pasca Panen Penangkapan Ikan untuk 2 (dua) KBLI 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut) dan KBLI 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat). Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pembagian kewenangan menjadi sebagai berikut:

- 5) Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan kewenangan:
 - a. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan terhadap pelaku usaha skala usaha besar (PMA) dengan tingkat resiko menengah rendah.
 - b. Pemerintah Daerah (Provinsi) memiliki kewenangan pelaku usaha skala menengah dan skala besar (PMDN) dengan tingkat resiko menengah rendah.
 - c. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan pelaku usaha skala mikro dan skala kecil (PMDN) dengan tingkat resiko rendah.
- 6) Berdasarkan data Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/ Online Single Submission (OSS), hingga Bulan Mei 2023:
 - a. Telah terbit 3 izin usaha jasa pasca panen yaitu KBLI 03133 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut yaitu 1) PT. Samudera Era Abadi - Jakarta Utara; 2) PT. Raja Hiu Nusantara - Jakarta Utara; dan 3) PT. Samudra Mas Group – Banyuwangi.
 - b. Terdapat 2 pemohon/perusahaan yang masih belum melengkapi persyaratan (belum memenuhi persyaratan dasar) yaitu PT. Bio Eco Farmer – Kabupaten Malang dan PT. Sino Indo Mutiara – Kota Mataram.

Dokumentasi *Refreshment* Pelayanan Prima Penerbitan Ijin Usaha Pasca



1.2.12. Sasaran Kegiatan Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

13. Indikator Kinerja Kegiatan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)

Definisi indikator ini adalah Prasarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan berupa IPAL yang berfungsi untuk mendukung fungsi bangunan penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) unit dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

Σa :

Jumlah Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan I, karena merupakan indikator yang dimasukkan dalam *automatic adjustment*.

Tabel 22. Target dan capaian IK 13

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWII	TA 2023	Sd TWII	% thd target TW 4
13	SK12. Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton						
	IK13. Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan, meskipun keseluruhan anggaran di blokir *automatic adjustment* sebagai kebijakan sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RBQ Pengadaan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton dengan pagu awal sebesar Rp 381.296.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 381.296.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

1.2.13. Sasaran Kegiatan Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku

14. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)

Definisi indikator ini adalah Penerapan sistem informasi pengelolaan gudang beku 1000 ton mengacu pada Warehouse Management System (WMS).

Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) unit dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X : Sistem informasi pengelolaan gudang beku

Σa : Jumlah sistem informasi pengelolaan gudang beku

Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit) merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan II.

Tabel 23. Target dan capaian IK 14

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWII	TA 2023	Sd TWII	% thd target TW 4
14	SK13. Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku						
	IK14. Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Unit	PA	-	1	-	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAN Sistem informasi pengelolaan gudang beku dengan pagu awal sebesar Rp 225.496.000,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp99.415.723,- atau sebesar 44,09% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

14.1. Penerapan aplikasi warehouse management system (WMS) pada cold storage 1000 Ton Muara Baru

Rapat penerapan aplikasi WMS dilaksanakan pada 13 April 2023 di Jakarta. Tujuan rapat adalah penerapan aplikasi WMS pada cold storage 1000 ton. Hal-hal yang dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Praktek implementasi penerapan aplikasi warehouse management system (WMS) pada cold storage 1000 Ton Muara Baru diikuti oleh perwakilan CS 1000 ton yaitu PT Indoprime Utama Mina dan PT Sakana Umi Nusantara Bahari, pengelola dan manager CS 1000 ton, perwakilan Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan serta APHP

- Madya dengan fasilitator berasal dari tim aplikasi PT Hima Wasesa Manunggal;
2. Praktek dimulai dengan registrasi mitra melalui aplikasi warehouse management system (WMS) dengan melengkapi dokumen – dokumen;
 3. Implementasi praktek dilakukan di ruang 7 lantai 2 cold storage 1000 ton dengan kapasitas 100 ton dengan lingkup praktek yang dilakukan diantaranya : tahapan pemasukan barang dengan menggunakan kandang macan dan forklift, tahapan penyusunan pada ruangan cold storage dengan mempertimbangkan efisiensi ruangan dan maksimal dan tahapan pengeluaran dimulai dari pemesanan pada aplikasi dan dikeluarkan sesuai dengan jadwal pesanan;
 4. Hasil rapat sebagai berikut :
 - a. Perlu praktek dan implementasi secara terus menerus agar pelaksanaan penerapan aplikasi warehouse management system (WMS) pada cold storage 1000 Ton Muara Baru dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan akhir;
 - b. Melakukan penataan ruangan secara berkala sehingga memudahkan dalam pelaksanaan warehouse management system (WMS).

1.2.14. Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)

15. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)

Definisi indikator ini adalah Sarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam mendukung operasional dan efektifitas ruang penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu. Target indikator tahun 2023 adalah 242 (dua ratus dua puluh empat) unit dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X : Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku

Σa : Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku

Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit) merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak

bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian pada Triwulan I.

Tabel 24. Target dan capaian IK 15

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TWII	TA 2023	Sd TWII	% thd target TW 4
15	SK14. Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku						
	IK15. Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Unit	PA	-	1	193	-

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAL Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku dengan pagu awal sebesar Rp 1.208.408.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 362.522.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan TW II adalah sebesar Rp819.514.400,- atau sebesar 67,82% terhadap pagu.

1.2.15. Sasaran Kegiatan Tercapainya Nilai PNPB Ditjen PDSPKP

16. Nilai PNPB Lingkup Direktorat Logistik (Milyar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan bidang penguatan daya saing produk Kelautan dan perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

- Objek/Ruang Lingkup PNPB : pelayanan, pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan hak negara lainnya
- Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNPB
 - b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNPB
 - c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target indikator tahun 2022 adalah 3,39 milyar dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$x = \sum a$$

a = Jumlah PNPB Direktorat logistik

Nilai PNBP lingkup Direktorat Logistik merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Indikator kinerja bersifat tahunan. Adanya peningkatan target tahun 2023 sebesar 3,27 milyar atau meningkat 96,46% dari target tahun 2022. Target PNBP tahun 2023 sebesar 6,66 milyar. Capaian tahun 2022 sebesar Rp 4.709.973.923,- atau setara dengan 138,9% dari target tahun 2022. Capaian PNBP sampai dengan TW II adalah sebesar Rp4.335.247.326,- atau sebesar 66% dari target tahun 2023.

Tabel 25. Target dan capaian IK 16

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				Sd TW II	TA 2023	Sd TW II	% thd target 2023
16	SK15. Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP						
	IK16. Nilai PNBP Lingkup Direktorat Logistik (Milyar)	Unit	PA	-	6,66 milyar	4,3 milyar	66

Beberapa kegiatan yang dilakukan sampai dengan TW II adalah sebagai berikut :

16.1. Tindak lanjut hasil review itjen terkait pengembalian dan pembayaran pengenaan denda kendaraan Jakarta dan Banjarmasin

Rapat tindak lanjut hasil review itjen terkait pengembalian dan pembayaran pengenaan denda kendaraan Jakarta dan Banjarmasin dilaksanakan pada 5 Juni 2023 di Jakarta, dihadiri oleh Subkorkel Pengelolaan BMN Setditjen PDS, Subkorkel Pengadaan, Subkorkel Tata Usaha, Pelaksanaan Pengadaan dan Penyimpanan. Tujuan rapat adalah menindaklanjuti temuan Itjen. Hasil rapat sebagai berikut :

1. Kondisi kendaraan lokasi di Bitung :
 - a. B 9601 (surat kir terakhir thn 2027, kepala lighter rusak, hanya 1 kunci kontak, lampu rusak, ujung pelat bordes berkarat dan keropos dan suhu mencapai min 18 derajat;
 - b. B 9600 PQV (perpanjangan stnk, kir terakhir thn 2028, pleat nomor blkg rusak, dudukan ban cadangan rusak, hny 1 kunci kontak, lampu rem sblh kiri rusak, lampudalam box rusak, kaca spion kiri rusak, klakson rusak, selang pendingin bocor, suhu hanya mencapai 10 derajat, fan belt compressor rusak, air curtain rusak dan kaca depan mobil retak
2. Klarifikasi dasar pengenaan denda dapat ditentukan dengan melakukan cek fisik kendaraan dan diperlukan kesepakatan bahwa kendaraan dalam kondisi hidup dan dapat diserahterimakan, untuk

- kendaraan yang belum diperbaiki dapat dikenakan denda pengembalian dan denda perbaikan;
3. Memberikan tenggang waktu untuk perbaikan kendaraan Banjarmasin dengan estimasi maksimal 1 bulan sejak pemeriksaan fisik;
 4. Pembahasan draft BAST kendaraan pick Jakarta B 9123 PTB, perbaikan semula diserahkan kepada Direktur Logistik menjadi Sekretaris Ditjen PDSPKP selaku Kuasa Pengguna Barang, Pasal 1 semula keadaan baik dan layak pakai menjadi keadaan baik karena khawatir mengandung makna lain;
 5. Perbaikan rem tangan kendaraan pick up sebelum dilakukan berita acara serah terima, jika tidak dilakukan perbaikan maka dapat dikenakan denda perbaikan sesuai klausul perjanjian kerjasama yaitu sebesar 50%.

Dokumentasi Tindak lanjut hasil review itjen terkait pengembalian dan pembayaran pengenaan denda kendaraan Jakarta dan Banjarmasin



16.2. Rapat Penentuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Cold Storage 2000 Ton Dan Sarana Pendukungnya di Muara Baru

Rapat dilaksanakan pada 8 Juni 2023 di Jakarta, dipimpin oleh Koordinator PP1 dan dihadiri oleh Subkorkel Penyimpanan, Subkorkel Pengadaan, Subkorkel Pengelolaan BMN Setditjen PDS, Subkorkel Keuangan Sesditjen PDSPKP, Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal KKP, Fungsional APHP Madya, dan Kelompok Pengadaan dan Penyimpanan. Tujuan rapat adalah penentuan sewa BMN cold storage 2000 ton. Hasil rapat sebagai berikut:

1. Disepakati bersama bahwa Perjanjian Sewa Masa Transisi dilakukan sebelum dilaksanakannya Perjanjian Sewa Baru. Masa Perjanjian Sewa Transisi selama 319 hari dimulai sejak berakhirnya perjanjian sewa lama yaitu sejak 16 Januari 2023 hingga 31 November 2023 dengan mempertimbangkan proses pengajuan sewa baru yang dilakukan di Kementerian Keuangan dan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Perhitungan waktu selama 319 hari mempertimbangkan proses mengingat hingga saat ini PT Perikanan Indonesia belum menyampaikan surat perpanjangan sewa baru;

3. Proses perpanjangan sewa dimulai sejak surat masuk pada minggu ke III 2023, selanjutnya pada minggu ke IV 2023 permohonan masuk proses verifikasi berkas dan kelengkapan, jika dokumen sudah sesuai selanjutnya pada minggu I Juli 2023 permohonan diteruskan ke Biro Keuangan, selanjutnya pada minggu ke II Juli 2023 masuk dalam tahap penilaian, dan minggu ke III 2023 dapat masuk jadwal penilaian KPKNL, jika proses berjalan sesuai maka estimasi pertengahan Agustus hasil penilaian selesai dan awal September 2023 persetujuan sewa terbit dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan yaitu sampai Desember 2023;
4. Adapun Nilai Perjanjian Sewa Masa Transisi sebesar Rp. 1.530.110.156,- (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*) dihitung dari nilai sewa tahun 2022 dibagi 365 hari x 319 hari (Rp. 1.750.753.000 : 365 hari = Rp. 4.796.584 x 319 hari);
5. Inspektorat IV KKP meminta kepada Direktorat Logistik untuk menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT. Perikanan Indonesia untuk memperbaiki kerusakan secara bertahap sesuai berita acara pemeriksaan dalam jangka waktu maksimal 2 bulan dan dilakukan monitoring secara berkala, apabila perbaikan tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi berdasarkan PMK 115 Tahun 2020;
6. Penyusunan dan penandatanganan naskah Perjanjian Sewa Transisi yang baru ditargetkan selesai pada akhir Juli 2023;
7. Nilai sewa baru CS 2000 ton dengan mempertimbangkan target PNBPD Direktorat Logistik Tahun 2023, hingga saat ini realisasi PNBPD yang dicapai sebesar 40% (Rp. 2.649.524.031) dari target tahun 2023 Rp. 6.600.000.000.

Dokumentasi Rapat Penentuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Cold Storage 2000 Ton Dan Sarana Pendukungnya di Muara Baru



16.3. Rapat Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Sewa CS 2000 Ton Masa Transisi

Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Sewa CS 2000 Ton Masa Transisi pada 9 Juni 2023 di Jakarta. Pembahasan dipimpin oleh Subkorkel Penyimpanan, dihadiri oleh Subkorkel Kerjasama Setditjen PDSPKP, perwakilan Korkel Keuangan dan

Umum Setditjen PDSPKP dan pelaksana Korkel Penyimpanan dan Pengadaan Dit Logistik. Hasil rapat sebagai berikut :

1. Apabila sudah ditentukan tanggal pelaksanaannya, maka jangka waktu perjanjian sewa berlaku sejak ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2023 hingga 31 November. Perjanjian Sewa Transisi ini melingkupi sewa sejak 16 Januari 2023 hingga 19 Juni 2023 dengan tujuan untuk menghindari adanya temuan;
2. Ditjen PDSPKP perlu menegaskan kembali kewajiban PT. Perindo untuk melaporkan bukti penyewaan kembali kepada pihak ke-3. Penyewaan kembali PT. Perindo kepada pihak ke-3 harus dilaporkan kepada Ditjen PDSPKP dan dengan persetujuan Ditjen PDSPKP;
3. Perlu didiskusikan kembali besaran kapasitas penyewaan kembali cs 2000 ton yg akan dilakukan PT. Perindo kepada pihak ke-3 mengingat besarnya kapasitas penyewaan kembali saat ini sudah melebihi 25%. PT. Perindo diwajibkan untuk melaporkan apabila terdapat pengusulan penambahan kapasitas penyewaan kembali kepada Ditjen PDSPKP;
4. Dibuat SOP rinci untuk menjelaskan hal-hal teknis tentang kewajiban PT.Perindo;
5. Perlu dibentuk Tim Kecil PDS untuk melakukan monev terpadu guna memperjelas pembagian penugasan antara fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan;
6. Perlu dilakukan pembahasan selanjutnya dengan mengundang Dirut PT. Perindo dan direncanakan dapat dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023.

Dokumentasi Rapat Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Sewa CS 2000 Ton Masa Transisi



1.2.16. Sasaran Kegiatan Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

17. Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkup Direktorat Logistik (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan

barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik pada Direktorat Logistik.

Target indikator tahun 2023 adalah sebesar 1215 orang dimana formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$X = \Sigma a$$

X :

Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik

Σa :

Jumlah Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkungan Direktorat Logistik

Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkup Direktorat Logistik merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Terdapat peningkatan target tahun 2023 sebesar 90 tenaga kerja yang terlibat atau sebesar 8% target 2022. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Target pelaporannya adalah pada TW IV, capaian tahun 2022 sebesar 1439 orang yang terdiri dari 1312 orang tenaga kerja tidak langsung/ penerima bantuan pemerintah dan sebesar 127 orang tenaga kerja langsung/ proyek.

Tabel 26. Target dan capaian IK 17

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWII	% thd target 2023
17	SK16. Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP						
	IK17. Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP Lingkup Direktorat Logistik (Orang)	Unit	PA	-	1215 orang	-	-

1.2.17. Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Logistik

18. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Logistik (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKPPenyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Formulasi :

$$IP_{Logistik} = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan :

$IP_{Logistik}$ = Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Logistik

IP_1 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Disiplin

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 83,2 sedangkan target semester I adalah sebesar 76. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

Capaian pada semester I adalah sebesar 79 atau mencapai 103,94%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 periode yang sama, terjadi peningkatan sebesar 8,9% atau 6,5 poin.

Tabel 27. Target dan capaian IK 18

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				s.d. TW 2	TA 2023	s.d. TW 2	% thd target SM2
18	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan						

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				s.d. TW 2	TA 2023	s.d. TW 2	% thd target SM2
	tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK18. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik (Indeks)	Indeks	SM	76	83,2	79	103,94

19. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Formulasi :

$$X = \sum a$$

X : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik

$\sum a$: Jumlah Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV dengan target Direktorat Logistik sebesar 80,5. Indikator kegiatan ini merupakan indikator baru tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 28. Target dan capaian IK 19

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWII	% thd target sd TW4
19	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK19. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik	Indeks	PA	-	80,5	-	-

20. Indikator Kinerja Kegiatan Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Direktorat Logistik tahun 2022.

Formulasi :

$$X = (\Sigma a / \Sigma b) \times 100$$

X :

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik

Σa :Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Direktorat Logistik Tahun 2022

Σb :Jumlah realisasi anggaran Unit Direktorat Logistik Tahun 2022

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV dengan target sebesar $\leq 0,5$. Indikator kegiatan ini merupakan indikator baru tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 29. Target dan capaian IK 20

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				sd TWII	TA 2023	sd TWII	% thd target sd TW 4
20	Sk17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK20. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik	Persentase	PA	-	$\leq 0,5$	-	-

21. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti

secara tuntas (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh unit Direktorat Logistik.

Formulasi :

$$X = (\Sigma a / \Sigma b) \times 100$$

X :Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik

Σa :Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindakInjuti

Σb :Jumlah rekomendasi yang diberikan

Persentase unit kerja yang melaksanakan Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 75. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian pada TW II adalah sebesar 97,19 atau 129,58% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama TW II pada tahun 2022, capaian 89 atau naik 8,4% dari capaian TW II tahun 202. Namun demikian Adanya penurunan sebesar 0,1 poin dari capaian TW I. Hal ini disebabkan adanya 5 rekomendasi PROSES dan 1 rekomendasi PENDING dari 178 rekomendasi. Namun demikian proses penyelesaian Rekomendasi masih tetap berjalan.

Tabel 30. Target dan capaian IK 21

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWII	% thd target 2023
21	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK21. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	75	75	97	129,58

22. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah

ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Bitrix24

Formulasi :

Pemenuhan Dokumen :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$$

Keaktifan :

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 80\%$$

MP Unit Level I = Nilai Pemenuhan Dokumen + Nilai Keaktifan

Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV

Persentase unit kerja yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Logistik Tahun 2023 ditargetkan sebesar 92. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian pada TW II adalah sebesar 100 atau 108,69% dari target. Tidak ada perbedaan capaian TW I dengan TW II. Jika dibandingkan dengan periode yang sama TW II pada tahun 2022, capaiannya sama yaitu 100. Adanya peningkatan dari target tahun 2023 yaitu dari 86 menjadi 92 atau naik 6 poin dari tahun 2022.

Tabel 31. Target dan capaian IK 22

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWI	% thd target TW II
22	S17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK22. Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	92	92	100	108,69

23. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik (%)

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Logistik dalam satu tahun anggaran.

$$x = \frac{\sum a}{b} \times 100\%$$

a = nilai anggaran yang direalisasikan (Rp)

b = nilai pagu anggaran (Rp)

X = Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat Logistik (%)

Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 95%. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capaian akan dilaporkan pada TW IV.

Tabel 32. Target dan capaian IK 23

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWII	% thd target TW 4
23	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK23. Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	-	95	-	-

24. Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Direktorat Logistik terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Formulasi :

$$x = A + B$$

X :

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik

A : Aspek market (40%)

B : Aspek demand (60%)

Penilaian IKU level eselon 2 dilakukan melalui penilaian mandiri yang dilengkapi dengan data dukung

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Perhitungan capaian dilakukan pada TW IV, sehingga pada TW II belum ada capaian.

Tabel 33. Target dan capaian IK 24

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWII	% thd target TW IV
24	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK24. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	-	77,5	-	-

25. Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Logistik . Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden
6. Pertimbangan lainnya yang relevan

$$Efektivitas = 80\% PT + 10\% IG + 10\% AT$$

Keterangan :

Efektivitas = Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis

PT = Pencapaian Tujuan

IG = Integrasi
 AT = Adaptasi

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV tahun 2023 dengan Persentase Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Logistik (%) ditargetkan sebesar 77,5. Indikator kegiatan ini merupakan lanjutan dari indikator tahun 2022, dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 99 atau sebesar 132% dari target 2022.

Tabel 34. Target dan capaian IK 24

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWII	% thd target TW 4
25	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK24. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Logistik (%)	Indeks	PA	-	77,5	-	-

26. Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Formulasi :

$$x = 1 + 2 + \dots + 5$$

X :

Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 (10%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (5%).

Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Perhitungan capaian dilakukan pada TW IV, sehingga pada TW II belum ada capaian.

Tabel 35. Target dan capaian IK 26

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Pola Hitung	Target		Capaian	
				TWII	TA 2023	TWII	% thd target TW 4
26	SK17. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Logistik						
	IK26. Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Logistik	Indeks	PA	-	77,5	-	-

1.3. Realisasi Anggaran Direktorat Logistik

Pagu Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2023 sebesar Rp77.144.186.000,-, sedangkan total anggaran blokir *automatic adjustment* (AA) sebesar Rp 18.344.823.000,- yang tersebar pada 13 Rincian Output (RO).

Realisasi anggaran Direktorat Logistik sampai dengan TW II adalah sebesar Rp 5.832.480.283,- sehingga persentase realisasi anggaran total sebesar **7,56% (sumber data Aplikasi Omspan dan Sakti)**

Adapun tabel realisasi anggaran **Direktorat Logistik** sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp)	Pagu Setelah AA (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil KP	Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	Unit	1	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	2.000.000.000	1.646.333.000	843481056
2	Tersedianya Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	Jumlah data dan informasi logistik hasil KP (Data)	Data	2	Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	1.467.500.000	1.027.250.000	341776731
3	Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	Jumlah Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	Lembaga	1	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	1.000.000.000	700.000.000	261600878
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	Rekomendasi kebijakan	1	Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	1.000.000.000	700.000.000	345221292
4	Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	Jumlah pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	Kemitraan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan	900.000.000	630.000.000	334831084
5	Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	Kesepakatan	18	Kemitraan dalam rangka distribusi hasil perikanan	900.000.000	630.000.000	77666273

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	Pagu Setelah AA (Rp)	Realisasi (Rp)
6	Tersedianya dan termanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	Unit	19	Pengadaan Gudang Beku Portable	43.108.549.000	34.388.411.000	1049687929
7	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	Jumlah pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	Unit	26	Pengadaan Mobil refrigerasi (berpendingin)	18.296.607.000	12.039.657.000	851450785
					Pengadaan Mobil refrigerasi (MP korporasi)	1.742.730.000	1.742.730.000	25714000
					Pengadaan Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak	2.613.600.000	2.613.600.000	71848000
8	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	Jumlah Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	Lembaga	8	Pengelola Gudang yang Difasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	800.000.000	560.000.000	341313336
9	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan	Jumlah Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	Lembaga	3	Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitas mendukung logistik Hasil Perikanan	1.000.000.000	700.000.000	234990812
10	Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	Jumlah Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	Layanan	1	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	500.000.000	350.000.000	133967984
11	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	Jumlah Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	Unit	1	Pengadaan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	381.296.000	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp)	Pagu Setelah AA (Rp)	Realisasi (Rp)
12	Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Jumlah Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	Unit	1	Sistem informasi pengelolaan gudang beku	225.496.000	225.496.000	99415723
13	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	Unit	242	Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.208.408.000	845.886.000	819514400

(sumber : Sakti)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Direktorat Logistik tahun 2023 memiliki 26 indikator kinerja yang terdiri dari 4 indikator kinerja yang bersifat triwulanan, 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran dan 21 indikator kinerja yang bersifat tahunan.

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari April sampai dengan Juni 2023. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan TW II sebesar 107,72. Nilai capaian TW II turun 5,88 poin atau sebesar 5,1% dari capaian tahun 2022 periode yang sama yaitu sebesar 113,6. Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan TW I, maka terjadi penurunan sebesar 0,87 poin. Hal ini disebabkan adanya capaian pada TW II yang tidak bisa dilaporkan dalam sistem aplikasi Kinerja karena sistem tidak bisa membaca capaian yang tidak ada targetnya pada TW II. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan selama TW II Tahun 2023, sehingga tidak ada rekomendasi untuk perbaikan pada Triwulan III, namun demikian tetap diperlukan meningkatkan pengawasan dalam rangka pencapaian target.

Terdapat 6 (enam) IKK Direktorat Logistik yang ditargetkan pada Triwulan II yaitu :

- a. **IKK 6. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP (Kesepakatan)**
Capaian sampai dengan Triwulan II, diatas target (122%) atau sebanyak 11 kesepakatan dari target sebanyak 9 kesepakatan;
- b. **IKK 7. Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)**
Capaian sampai dengan Triwulan II, sesuai target (100%) atau sebanyak 8 kesepakatan dari target sebanyak 8 kesepakatan;
- c. **IKK 10. Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)**
Capaian sampai dengan Triwulan II, sesuai target (100%) atau sebanyak 4 lembaga dari target sebanyak 4 lembaga;
- d. **IKK18. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)**
Capaian sampai dengan Triwulan II, diatas target (103,9%) atau sebesar 79 dari target sebesar 76;
- e. **IKK 21. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik**
Capaian sampai dengan Triwulan II, di atas target (129,3%) atau sebesar 97 dari target sebesar 75;

f. **IKK 22. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar**

Capaian sampai dengan Triwulan II, di atas target (108,69%) atau sebesar 100 dari target sebesar 92.

Terdapat 3 (tiga) IKK Direktorat Logistik yang tidak ditargetkan pada Triwulan II namun terdapat capaian yaitu :

a. **IKK 11. Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)**

Capaian sampai dengan Triwulan II sebanyak 1 lembaga atau sebesar 33,33% dari target tahun 2023;

b. **IKK 15. Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)**

Capaian sampai dengan Triwulan II sebanyak 193 unit atau sebesar 79,75% dari target tahun 2023;

c. **IKK 16. Nilai PNBP Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)**

Capaian sampai dengan Triwulan II sebanyak Rp4.335.247.326,- atau sebesar 66% dari target tahun 2023 dari target tahun 2023.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT LOGISTIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Berny A. Subki**
Jabatan : Direktur Logistik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 April 2023

**Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

**Pihak Pertama,
Direktur Logistik**


Budi Sulistiyo


Berny A. Subki

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT LOGISTIK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5
2.	Pemetaan dan pemantauan logistik hasil kelautan dan perikanan	2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1
3.	Tersedianya profil ketersediaan dan kebutuhan hasil kelautan dan perikanan	3.	Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)	2
4.	Terkelolanya rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik	4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	1
		5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi)	1
5.	Terserap dan tersimpannya hasil perikanan dari sentra produksi	6.	Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil kelautan dan perikanan (Kesepakatan)	18
6.	Terdistribusikannya hasil kelautan dan perikanan	7.	Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan (Kesepakatan)	18
7.	Tersedianya dan termemanfaatkannya sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan	8.	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (Unit)	19
8.	Tersedianya sarana distribusi hasil perikanan	9.	Pengadaan sarana distribusi yang disediakan (Unit)	26
9.	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	10.	Lembaga Pengelola Gudang yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	8
10.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi	11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitasi	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	mendukung Logistik Hasil Perikanan		mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	
11.	Tersedianya Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen	12.	Layanan Perijinan Usaha Jasa Pasca Panen yang disediakan (Layanan)	1
12.	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	13.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton (Unit)	1
13.	Tersedianya Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	14.	Sistem informasi pengelolaan gudang beku (unit)	1
14.	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	15.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)	242
15.	Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	16.	Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar)	6,66
16.	Terlibatnya tenaga Kerja dalam Pembangunan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	17.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Direktorat Logistik (Orang)	1.215
17.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik	18.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	83,2
		19.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	80,5
		20.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Logistik (%)	≤0,5
		21.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	75
		22.	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92
		23.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95

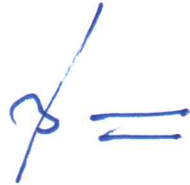
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		24.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5
		25.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5
		26.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Logistik (%)	77,5

DATA ANGGARAN

NO	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (Rp.000)
	LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	77.744.186
	Total Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2023	77.744.186

Jakarta, 13 April 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Pertama,
Direktur Logistik



Berny A. Subki